PEMERINTAH
KABUPATEN
TAPIN

BerAKHLAK
#bangga melayani bangsa

LKjIP 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN

TAHUN 2026

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Tapin

Dinas Komunikasi Dan Informatika

Jl. Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru RT.01

Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara

Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan

E-mail: *kominfotapin@gmail.com*

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 diwarnai agenda refocusing dan realokasi anggaran. Meskipun demikian Dinas Komunikasi dan Informatika tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rantau, 14 April 2026
Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tapin

WAHYUDI PRANOTO, S.SOS, MT
NIP. 19710130 199903 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GRAFIK vi
DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Penjelasan Umum Organisasi 2
1.2.1. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja 2
1.2.2. Anggaran 6
1.3. Dasar Hukum 6
1.4. Sistematika Laporan Kinerja 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9
2.1. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah 9
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 20
3.2. Efisiensi Anggaran 79

BAB IV PENUTUP 91
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025 6
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis 9
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025..... 9
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025.....14
Tabel 2.4 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025.....14
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja 21
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 21
Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1..22
Tabel 3.4 Komponen Penilaian Sasaran 1 23
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 25
Tabel 3.6 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 1 27
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Sasaran 1 dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota.....28
Tabel 3.8 Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan terhadap Sasaran 1 28
Tabel 3.9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2..32
Tabel 3.10 Komponen Penilaian Sasaran 2 33
Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 36
Tabel 3.12 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 2 38
Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Sasaran 2 dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota.....38
Tabel 3.14 Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan terhadap Sasaran 2 39
Tabel 3.15 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 341
Tabel 3.16 Komponen Penilaian Sasaran 3 42
Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 45
Tabel 3.18 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 3 47

Tabel 3.19 Perbandingan Capaian Sasaran 3 dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota.....48
Tabel 3.20 Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan terhadap Sasaran 3.....49
Tabel 3.21 Lokasi CCTV Publik.....58
Tabel 3.22 Rekap Berita Media Online Tahun 2025 61
Tabel 3.23 Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat Berdasarkan Status Tahun 2025.....62
Tabel 3.24 Kerjasama Layanan Hubungan Media 64
Tabel 3.25 Rekapitulasi Aduan Di Aplikasi LAPOR Berdasarkan Klasifikasi Aduan Tahun 2025.....65
Tabel 3.26 Nilai Indeks Pembangunan Statistik 67
Tabel 3.27 Kebijakan Keamanan Informasi 71
Tabel 3.28 Insiden Siber Domain Tahun 2025 72
Tabel 3.29 Kerjasama Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2025.....74
Tabel 3.30 Kertas Kerja Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi 76
Tabel 3.31 Perbandingan Pencapaian Kinerja Tujuan dan Anggaran ...79
Tabel 3.32 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran dan Anggaran .81
Tabel 3.33 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran 82

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 23
Grafik 3.2 Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah 26
Grafik 3.3 Indeks Profesionalitas ASN 36
Grafik 3.4 Perbandingan Capaian IP-ASN Perangkat Daerah 37
Grafik 3.5 Indeks SPBE Kabupaten Tapin 43
Grafik 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Indeks SPBE 46
Grafik 3.7 Indeks SPBE Tahun 2025 48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin 5
Gambar 3.1 Asistensi Pohon Kinerja, Perbaikan IKU dan PK.....31
Gambar 3.2 Pemanfaatan Aplikasi E-SAKIP NG dan Monev Rencana Aksi 32
Gambar 3.3 Bimtek Penilaian SPIP Terintegrasi dan Kepegawaian 41
Gambar 3.4 Jaringan Fiber Optic 56
Gambar 3.5 Aplikasi Layanan Terintegrasi.....57
Gambar 3.6 Koordinasi Evaluasi SPBE dan Pendampingan Arsitektur SPBE 60
Gambar 3.7 Konten Berita Pada Media Facebook Dan Instagram.....61
Gambar 3.8 Konten Berita Pada Media Elektronik Online 62
Gambar 3.9 Fasilitasi Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).....63
Gambar 3.10 Koordinasi dan Monitoring SP4N LAPOR! 65
Gambar 3.11 Layanan Informasi Publik.....66
Gambar 3.12 Timeline Pelaksanaan EPSS Tahun 2026.....67
Gambar 3.13 Kegiatan Monev EPSS.....68
Gambar 3.14 Indeks KAMI.....69
Gambar 3.15 Bimtek CSIRT Kabupaten Tapin 73
Gambar 3.16 Bimbingan Teknis TTE 75

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran

terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Persandian;
d. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyediaan Data Statistik Sektoral;

e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
g. Pengelolaan kesekretariatan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin terdiri dari :

1. Sekretariat, terdiri atas:
   a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   c. Sub Bagian Keuangan;
2. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas:
   a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik Penyetaraan JFT. Pranata Hubungan Masyarakat;
   b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik Penyetaraan JFT. Pranata Hubungan Masyarakat;
   c. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media JFT. Pranata Hubungan Masyarakat.
3. Bidang Penyelenggaraan E-Government, terdiri atas:
   a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi Penyetaraan JFT. Pranata Komputer;
   b. Seksi Infrastruktur dan Teknologi Penyetaraan JFT. Pranata Komputer;
   c. Seksi Layanan E-Government Penyetaraan JFT. Pranata Komputer.
4. Bidang Persandian dan Statistik, terdiri atas;
   a. Seksi Persandian Penyetaraan Sandiman Ahli Muda;

b. Seksi Statistik Penyetaraan Statistisi Ahli Muda.

5. Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana

Berikut bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

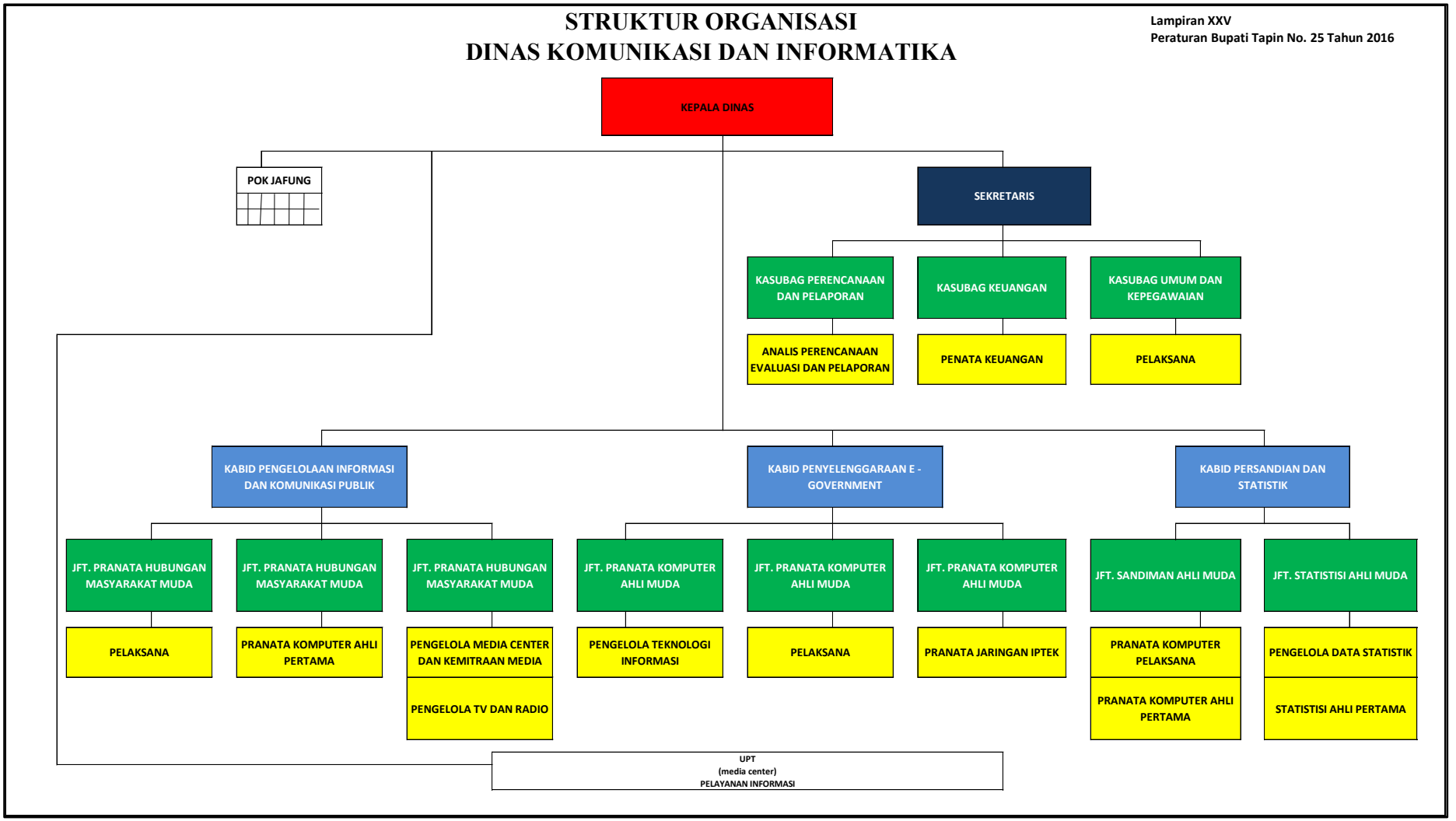

Sumber : Lampiran Perbub Tapin No. 25 Tahun 2016

1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	*(2)*	*(3)*
APBD	Tahun 2024	Rp 20.305.941.482
APBD	Tahun 2025	Rp 11.602.126.525
Sumber Lainnya (Jika Ada)		Rp -

Sumber : DPA Dinas Kominfo TA.2024 dan 2025

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama *(strategic issued)* yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1 Perjanjian Kinerja.
2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	1	Meningkatnya indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4 poin	4.1 poin	4.2 poin	4.3 poin	4.4 poin
				Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	0	1.7 poin	1.8 poin	1.9 poin	2 poin
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 poin	82 poin	83 poin	84 poin	85 poin
		2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	80 poin	81 poin	82 poin	83 poin	84 poin

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Periode 2025 - 2029

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	IKM merupakan data dan informasi	RATA RATA SKOR = ∑ (Skor tiap responden	Laporan Survey Kepuasan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	publik berbasis IT				tentang Tingkat kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Masyarakat dalam memperoleh layanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya – Kompilasi Nilai dari Hasil Survey Pelayanan	pada setiap parameter) _____ Jumlah Responden NILAI INDEKS = ∑ (Rata-rata skor tiap parameter) _____ Jumlah Parameter IKM = Nilai Indeks x 25 *Karena nilai indeks berada di rentang [1,0 – 4,0], setelah dikali 25, rentang IKM menjadi [25 – 100]	Layanan Diskominfo
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1	Nilai SAKIP	poin	Akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah tingkat pertanggungjawaban perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran yang didasarkan pada prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, serta pencapaian hasil sesuai dengan	Bobot Maksimal Komponen yang dinilai : Perencanaan Kinerja = 30, Pengukuran Kinerja = 30, Pelaporan Kinerja = 15 dan Evaluasi Internal = 25	LHE AKIP

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					perencanaan kinerja, yang diukur melalui dokumen laporan kinerja, audit internal/eksternal, dan kepatuhan terhadap indikator kinerja utama (IKU). Berdasarkan Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		
3	Meningkatnya indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	indeks	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE	Domain : Kebijakan 13% Tata Kelola 25% Manajemen 16,5% Layanan 45,5%	LHE SPBE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.		
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	poin	Akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah tingkat pertanggungjawaban perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran yang didasarkan pada prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, serta pencapaian hasil sesuai dengan perencanaan kinerja, yang diukur melalui dokumen laporan kinerja, audit internal/eksternal, dan kepatuhan terhadap indikator kinerja utama (IKU). Berdasarkan Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas	Bobot Maksimal Komponen yang dinilai : Perencanaan Kinerja = 30, Pengukuran Kinerja = 30, Pelaporan Kinerja = 15 dan Evaluasi Internal = 25	LHE AKIP

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					Kinerja Instansi Pemerintah		
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	1	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	poin	Rumus pengukuran Indeks profesionalitas ASN yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator. Hasil penilaian berdasarkan hasil penilaian yang diunggah pada Aplikasi Padaringan/ MyASN	SKOR : IP = ∑IP IP = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4 IP_1 : Nilai kualifikasi, IP_2 : Nilai kompetensi, IP_3 : Nilai kinerja, IP_4 : Nilai disiplin Bobot: Kualifikasi 25% Kompetensi 40% Kinerja 30% Disiplin 5%	Rekap Aplikasi padaringan/MyASN

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 poin
1-1	Meningkatnya indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4 poin
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	72,95 poin
2-1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 poin
2-2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	80 poin

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika:

Tabel 2.4 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	26.05 poin
		Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	25.6 poin

		Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	12.85 poin
		Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja)	16.5 poin
		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 %
1-1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100 %
		Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100 %
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklajuti	100 %
1-1-1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen
1-1-2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen
1-2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungajawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100 %
		Persentase Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100 %
1-2-1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288 orang/ bulan
1-2-2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
1-2-3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan
1-3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	87 %
1-3-1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket

1-3-2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket
1-3-3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket
1-3-4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan
1-3-5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
1-4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan baik	100 %
1-4-1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
1-4-2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
1-5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	100 %
1-5-1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit
1-5-2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit
1-5-3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase peningkatan jasa publikasi daerah	80 %
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	92 %
		Persentase ketersediaan data informasi publik yang di sediakan	96 %
		Persentase aduan masyarakat yang ditindak lanjuti pada Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor)	92 %

2-1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah jam tayang	92 %
		Persentase admin PPID yang ditingkatkan kapasitasnya	88 %
		Persentase pejabat penghubung yang mendapatkan Monev Aplikasi SP4N Lapor	91 %
		Persentase kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibina	56 %
2-1-1	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media yang terdaftar di Dinas Kominfo	5 media
2-1-2	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang aktif di Dinas Kominfo	1 kelompok
2-1-3	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diminta	3 permohonan
2-1-4	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah Aduan masyarakat yang diterima melalui Aplikasi SP4N LAPOR	4 dokumen
2-1-5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media yang dikelola oleh Dinas Kominfo	4 media
2-1-6	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang mengikuti bimtek/ pelatihan	4 orang
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE	0
		Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan jaringan intra yang dikelola oleh diskominfo	78 %
		Persentase aplikasi yang sudah terintegrasi	80 aplikasi
3-1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	75 %
3-1-1	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	10 layanan
3-2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa / kelurahan bebas low spot (sinyal lemah)	62 %

		Persentase kualitas akses internet dengan kecepatan rata-rata 50 Mbps	72 %
		Persentase wifi publik yang disediakan untuk masyarakat	43 %
		Persentase server sesuai standar	71 %
3-2-1	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Evaluasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 dokumen
3-2-2	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra yang disediakan oleh Dinas Kominfo	21 perangkat daerah
3-2-3	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	4 dokumen
3-2-4	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan pelaksanaan manajemen SPBE	12 laporan
3-2-5	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi yang dibangun atau dikembangkan oleh Dinas Kominfo	1 aplikasi
3-2-6	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Wifi Publik yang dikelola Dinas Kominfo	3 unit
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.63 poin
		Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas	70 %
		Persentase data Statistik Sektoral yang disediakan tepat waktu	90 %
4-1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang telah mendapat Bimtek/Desk Statistik Sektoral	64 %
		Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan Data Sektoral	100 %
		Persentase Perangkat Daerah yang di Monev Statistik Sektoral	100 %
4-1-1	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan bimtek/pelatihan di bidang statistik	120 orang
4-1-2	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai	Jumlah Laporan Kegiatan Satu Data Indonesia	1 laporan

	dengan Prinsip Satu Data Indonesia		
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkatnya Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	66 %
		Persentase SDM yang memiliki sertifikat keamanan informasi	47 %
		Jumlah Kegiatan Computer Security Incident Response Team (CSIRT)	92 %
		Persentase titik Pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi PHKS yang teramankan	20 %
5-1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Tata Kelola Pengamanan Informasi pada website SANAPATI	86 %
		Persentase SDM yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik Sesuai Permohonan	92 %
		Persentase peserta yang mendapatkan nilai diatas passing grade	88 %
		Persentase perangkat daerah yang melakukan Pengelolaan aset informasi sesuai dengan peraturan	43 %
5-1-1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah	8 laporan
5-1-2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Tanda Tangan Elektronik	54 perangkat daerah
5-2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Tata Kelola Pengamanan Informasi pada website SANAPATI	86 %
5-2-1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	54 perangkat daerah

Sumber : DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan

sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam mengukur kinerja, ditetapkan predikat nilai capaian kinerja yang dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dengan Bupati Tapin pada tahun 2025. Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	72,95 poin	80,50 poin	110,35 %	Sangat Baik	LHE AKIP
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 poin	80,50 poin	99,38 %	Sangat Baik	LHE AKIP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
	Perangkat Daerah						
1.2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	80 poin	81,59 poin	101,99 %	Sangat Baik	Rekap Aplikasi Padaringan/ MyASN
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 poin	94,37 poin	111,02 %	Sangat Baik	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
2.1	Meningkatnya indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4 poin	3,95 poin	98,75 %	Sangat Baik	LHE SPBE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Sumber : Monev Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2025

Adapun analisis capaian kinerja per Sasaran Strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 Sasaran Strategis 1 "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah"

Sasaran kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	a. Perencanaan Kinerja = 30 b. Pengukuran Kinerja = 30 c. Pelaporan Kinerja = 15 d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal = 25

Sumber : PERMENPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021

Penetapan bobot Penilaian SAKIP Perangkat Daerah diatas berpedoman pada PERMENPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai SAKIP Perangkat Daerah atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 untuk Dinas Kominfo mencapai 80,50 poin dengan predikat A (Memuaskan), dari target nilai tahun 2025 pada 81 poin dengan capaian 99,38% dengan kategori Sangat Tinggi. Penilaian tersebut menunjukkan Tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas Pembangunan budaya kinerja birokrasi dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan pada hasil, serta efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Kominfo dengan rincian penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.4 Komponen Penilaian Sasaran 1

Komponen Yang Dinilai		Target	Nilai
A	Perencanaan Kinerja	25,60	**24,60**
B	Pengukuran Kinerja	26,05	**23,10**
C	Pelaporan Kinerja	12,85	**12,30**
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16,50	**20,50**
Nilai Akuntabilitas Kinerja		**81**	**80,50**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**A**

Sumber : Monev Rencana Aksi Dinas Kominfo Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat digambarkan pada grafik penilaian capaian berikut ini :

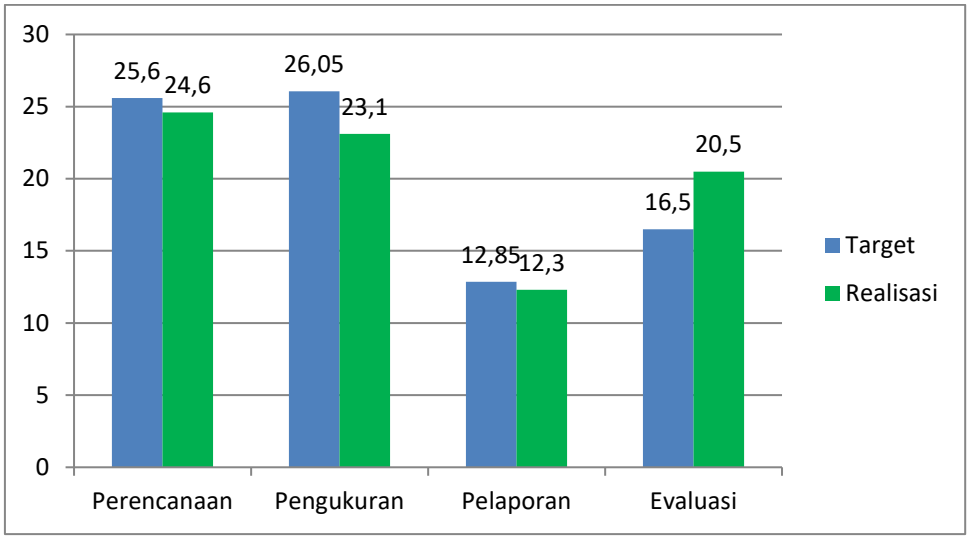

Grafik 3.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Dari pencapaian diatas dapat dijelaskan bahwa Pada komponen Perencanaan Kinerja diukur berdasarkan pemenuhan ketersediaan dokumen dan kualitas dokumen. Untuk Dinas Kominfo pada komponen ini mendapat nilai 24,6 poin dari target nilai 25,60 poin sudah sangat baik, dimana dokumen pedoman teknis perencanaan kinerja, Dokumen Renstra, Dokumen Renja, RKA dan dokumen perencanaan lainnya telah memenuhi standar yang baik dengan menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain. Serta perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun yang menjadi catatan adalah bahwa target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum menantang sehingga perlu dilakukan Analisa Penetapan target kinerja.

Pada komponen Pengukuran Kinerja mendapat nilai 23,10 poin dari target 26,05 poin juga sangat baik, dimana Dinas Kominfo telah melakukan pengukuran dengan melakukan pengumpulan data kinerja sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Telah ditetapkan definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikataor kinerja. Pengukuran kinerja menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Pengukuran kinerja juga telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Dinas Kominfo juga telah memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.

Dalam Pelaporan Kinerja Dinas Kominfo mendapat nilai 12,30 poin dari target 12,85 poin telah mencapai target. Dokumen laporan kinerja yang disediakan telah disusun secara berkala, direviu, diformalkan, dipublikasikan dan telah disampaikan tepat waktu. Dokumen laporan kinerja telah memberikan dampak yang besar

dalam penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mempengaruhi perubahan budaya kerja organisasi. Namun dokumen laporan kinerja dinilai belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan. Sehingga perlu diperhatikan agar dapat memuat upaya nyata serta hambatan nya dalam perbaikan kinerja kedepan.

Pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Kominfo mendapat nilai 20,50 poin dari target 16,50 poin, capaian ini sudah melebihi target. Dimana Dinas Kominfo telah melaksanakan Evaluasi secara berjenjang pada seluruh unit kerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai. Dalam pelaksanaannya telah menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi). Impelementasi SAKIP telah meningkat karena adanya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal namun belum memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Dari pencapaian komponen diatas dengan adanya perbaikan penyusunan Pohon Kinerja melalui penjenjangan kinerja (Cascading) sesuai Permenpan RB Nomor 89 tahun 2021, Perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) atas hasil asistensi perbaikan Pohon Kinerja, kemudian pemanfaatan IT dalam Pengukuran kinerja dan Evaluasi kinerja Internal melalui pemanfaatan aplikasi internal SiEmon Diskominfo dan pemanfaatan e-SAKIP New Generation.

Perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2025)		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2025)		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,15 poin	75,55 poin	79,05 poin	81 poin	80.5 poin	99,38 %

Sumber : Monev Capaian IKU Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2022-2025

Dari tabel capaian sasaran diatas dapat digambarkan kedalam grafik berikut dibawah ini :

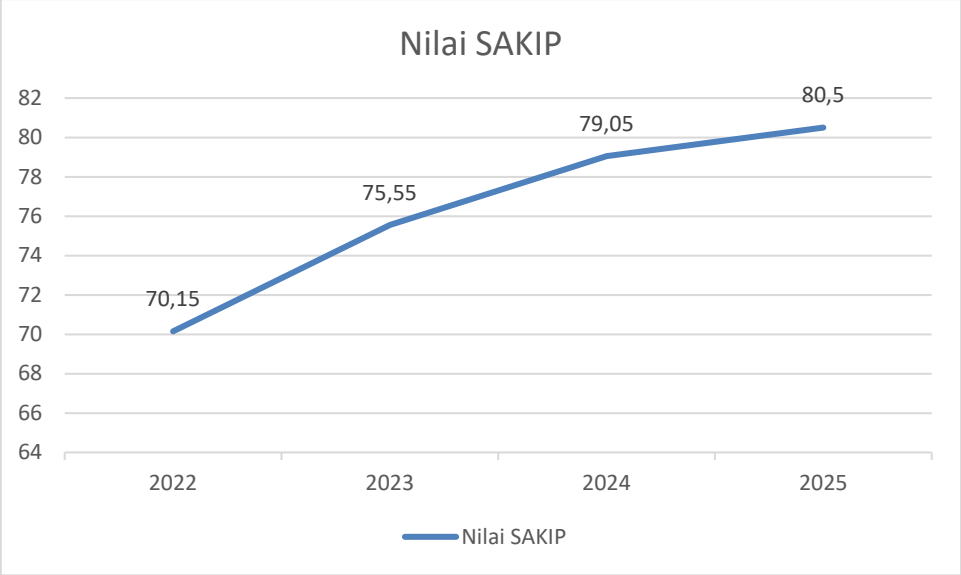

Grafik 3.2 Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa Nilai SAKIP Perangkat Daerah atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 untuk Dinas Kominfo mencapai 80,50 poin dengan predikat A, dari target Nilai tahun 2025 pada 81 poin dengan capaian 99,38%. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 79,05 poin di tahun 2024, nilai 75,55 poin di tahun 2023, dan nilai 70,15 poin di tahun 2022, maka terjadi peningkatan masing-masing sebesar 1,83% dari tahun 2024, selanjutnya 6,51% dari tahun 2023 dan peningkatan sebesar 14,75% dari tahun 2022, Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Evaluator APIP Inspektorat bahwa penilaian tersebut menunjukan tingkat efektifitas dan efisiensi

penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, menunjukan hasil yang "Memuaskan".

Selanjutnya hasil perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin periode 2025-2029 dengan menggunakan rumus berikut ini :

$$realisasi = \frac{realisasi\ tahun\ n}{target\ renstra} x100\%$$

Jika nilai persentase perbedaan kinerja yang diperoleh melebihi 100%, maka dapat dianggap bahwa peningkatan kinerja tahun ini dibandingkan dengan dengan target renstra adalah 100%, dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.6 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 1

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6) =4/5*100*
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.5 poin	85 poin	94,71 %

Sumber : Monev Capaian IKU Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2025

Capaian dari Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dijelaskan bahwa Nilai SAKIP Perangkat Daerah atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 untuk Dinas Kominfo mencapai 80,50 poin dengan predikat A, dari target nilai tahun 2025 pada 81 poin dengan capaian 99,38%. Dibandingkan dengan Akhir Renstra Tahun 2029 pada target nilai 85 poin dengan tingkat kemajuan 94,71%, maka capaian sudah sangat baik.

Realisasi kinerja untuk Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2025 tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional/provinsi/kab/kota

lain karena sasaran ini tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) nya.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Sasaran 1 dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Lain	% Capaian
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6) =4/5*100*
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,5 poin	Tidak dapat diperbandingkan	-

Sumber : Monev Capaian IKU Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2025

Keberhasilan capaian Sasaran 1, dengan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan terhadap Sasaran 1

No	Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Tahun 2025		Capaian
			Target	Realisasi	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	**MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH**	**81 poin**	**80,50 poin**	**99,38%**
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)**	**25,6 poin**	**24,60 poin**	**96,09%**
		Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	**26,05poin**	**23,10 poin**	**88,67%**
		Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	**12,85 poin**	**12,30 poin**	**95,71%**
		Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	**16,5 poin**	**20,50 poin**	**124,24 %**
		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	**100%**	**100%**	**100%**
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100%	100%	100%

		Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklajuti	100%	100%	100%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	100%
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungajawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%	100%	100%
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288 orang/ bulan	288 orang/ bulan	100%
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	2 laporan	2 laporan	100%

		Semesteran SKPD			

Sumber : Monev Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2025

Faktor Pendukung Keberhasilan :

a. Adanya perbaikan penyusunan Pohon Kinerja melalui penjenjangan kinerja (Cascadding) sesuai Permenpan RB Nomor 89 tahun 2021, perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) atas hasil asistensi sakip.
b. Penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal terhadap sasaran kinerja strategis maupun operasional,
c. Pemanfaatan IT dalam Pengukuran kinerja dan Evaluasi kinerja Internal melalui pemanfaatan aplikasi internal SiEmon Diskominfo dan pemanfaatan e-SAKIP New Generation.

Faktor Penghambat :

a. Komitmen sebagian pegawai terhadap implementasi sakip masih belum tinggi,
b. Sebagian pegawai belum memahami kinerjanya masing-masing, sehingga sasaran kinerja dan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja kurang relevan dan belum menantang,
c. Dokumen laporan kinerja dinilai belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan.

Secara umum kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dinilai telah berhasil mencapai target yang didukung dengan Melakukan kegiatan terkait penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian internal, monitoring dan evaluasi, dan pembuatan laporan kinerja dan Kegiatan pengeloaan keuangan dan penyusunan pelaporan keuangan.

Gambar 3.1 : Asistensi Pohon Kinerja, Perbaikan IKU dan PK

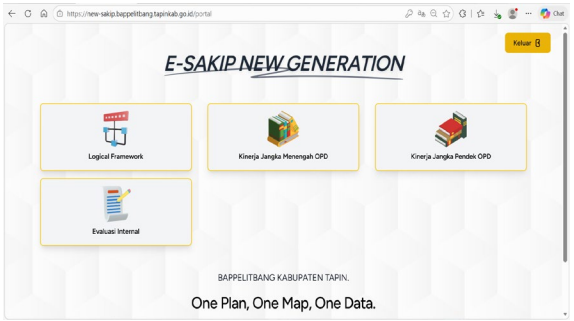

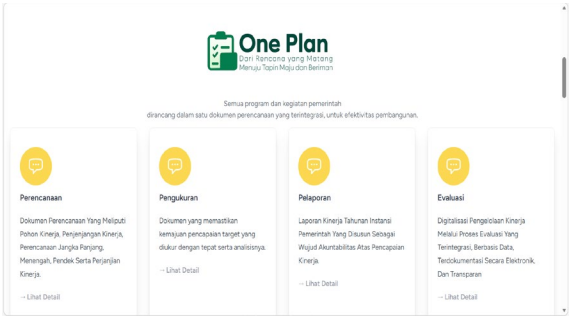

Gambar 3.2 : Pemanfaatan Aplikasi E-SAKIP NG dan Monev Rencana Aksi

3.1.2 Sasaran Strategis 2 "Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah"

Sasaran kinerja Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah diukur dengan indikator dan meta indikator berikut :

Tabel 3.9
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah IP = ∑IP IP = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4 IP_1 : Nilai kualifikasi, IP_2 : Nilai kompetensi, IP_3 : Nilai kinerja, IP_4 : Nilai disiplin	a. Kualifikasi Pendidikan = 25 b. Kompetensi Pegawai = 40 c. Kinerja Pegawai = 30 d. Hukuman Disiplin = 5

Sumber : PERMENPAN-RB Nomor 38 Tahun 2018

Penetapan bobot Penilaian Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah diatas berpedoman pada PERMENPAN-RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalisme ASN dan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah pada tahun 2025 Dinas Kominfo memperoleh Nilai 81,59 poin dari target

80 poin yang ditetapkan dengan capaian 101,99% dengan kategori capaian Sangat Tinggi. Indeks ini diperoleh melalui Aplikasi MyASN BKN berbasis android dan desktop untuk semua pegawai yang merupakan penerapan sistem merit terhadap penilaian kinerja dan profesionalitas pegawai melalui 4 (empat) dimensi yaitu Kualifikasi jenjang Pendidikan, Kompetensi Pegawai, Kinerja Pegawai, dan Disiplin Pegawai dengan rincian penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.10 Komponen Penilaian Sasaran 2

Dimensi		Bobot Indikator	Nilai
a	Kualifikasi Pendidikan	25	22,3
b	Kompetensi Pegawai	40	29,29
c	Kinerja Pegawai	30	25
d	Hukuman Disiplin	5	5
Nilai Profesionalisme ASN		**100**	**81,59**
Tingkat Profesionalisme ASN			**Tinggi**

Sumber : Monev Rencana Aksi Dinas Kominfo Tahun 2025

Pada Dimensi Kualifikasi dilihat berdasarkan jenjang Pendidikan dengan komposisi jumlah pegawai yaitu 2 orang Pascasarjana, 15 orang Sarjana, 1 orang Diploma dan 2 orang SMA. Dengan rata-rata nilai 22,3 poin atau sebagian besar pegawai pada Dinas Kominfo adalah Sarjana S1. Jika dilihat Jabatan berdasarkan jenjang kualifikasi pendidikan ini dimana pada jabatan pimpinan tinggi/Eselon II saat ini dijabat oleh lulusan S2, pada jabatan Administrator untuk eselon IIIA/Sekretaris dijabat oleh lulusan S2, sementara untuk eselon IIIB/Kepala Bidang dijabat oleh lulusan S1. Pada jabatan pengawas rata-rata dijabat oleh S1, kemudian pada jabatan Pelaksana/Fungsional sebagian besar adalah S1 dan lainnya Diploma. Untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar. Pemberian tugas belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/

atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi suatu jabatan. Apabila PNS memiliki keahlian atau kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya maka akan berdampak pada peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan sikap dan kepribadian professional PNS sehingga diharapkan mampu meningkatan nilai IP ASN.

Untuk Dimensi Kompetensi maksimal bobot penilaian adalah 40 poin dibagi menjadi 22,5 poin diklat teknis dan 17,5 poin seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnya yang dibuktikan dengan sertifikat/surat tugas dan sejenisnya. Untuk Dinas kominfo rata-rata nilai 29,29 poin atau sebagian besar mengikuti seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnya, meskipun demikian beberapa pegawai pernah mengikuti diklat teknis namun masa berlaku sertifikat yang dimiliki telah lebih dari 2 tahun, sehingga penilaiannya tidak diperhitungkan. Idealnya Diklat tenis ini dapat diikuti setiap tahun oleh setiap pegawai. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pelatihan klasikal dan non klasikal sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

Pada Dimensi Kinerja dilihat berdasarkan riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP) dengan bobot masing-masing 60% dan 40% *(PP Nomor 46 Tahun 2011)*. Penilaian SKP meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target sedangkan penilaian perilaku kerja meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama dan kepemimpinan. Untuk Dinas Kominfo rata-rata nilai 25 poin atau sebagian besar pegawai berkinerja baik. Hasil ini didapat dari pelaporan kinerja inidividu pada aplikasi eKinerja BKN.

Selanjutnya pada Dimensi Disiplin dilihat berdasarkan

data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima. Adapun kategori Hukuman Disiplin berdasarkan Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022; adalah Hukuman Ringan, Hukuman Sedang, dan Hukuman Berat.

- Kategori Hukuman Ringan dengan teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis, dengan pelanggaran:
- Kategori Hukuman Disiplin Sedang dengan:
  1. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan,
  2. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan,
  3. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan.
- Kategori Hukuman Disiplin Berat meliputi:
  1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan,
  2. Pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 bulan,
  3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

  Pada Dinas kominfo tidak ditemukan riwayat pelanggaran disiplin sehingga nilai keseluruhan pada dimensi ini adalah 5 poin.

Dari penjelasan diatas dapat digambarkan pada grafik capaian penilaian berikut dibawah ini :

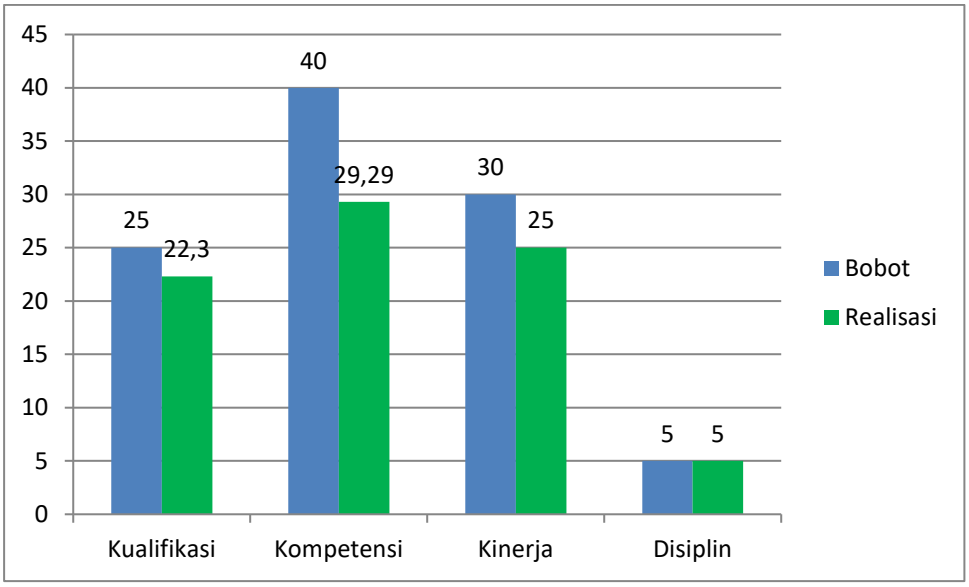

Grafik 3.3 Indeks Profesionalitas ASN

Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang Tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, Tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2025)		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Dearah	N/A	50,2 Poin	76,87 Poin	80 poin	81,59 poin	101,99 %

Sumber : Monev Capaian IKU Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2022-2025

Dari tabel capaian sasaran diatas dapat digambarkan kedalam grafik berikut dibawah ini :

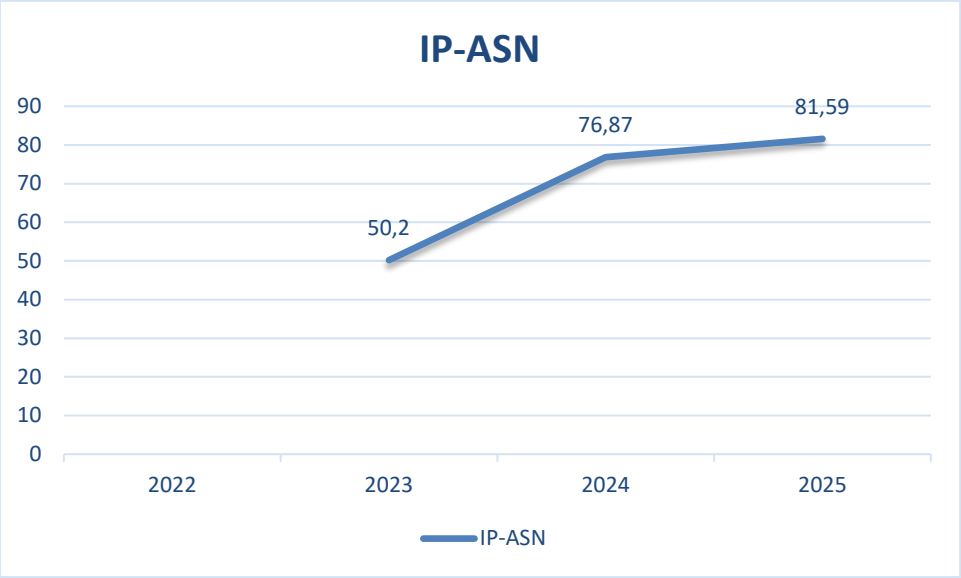

Grafik 3.4 Perbandingan Capaian IP-ASN Perangkat Daerah

Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah pada tahun 2025 untuk Dinas Kominfo memperoleh Nilai 81,59 poin dari target 80 poin yang ditetapkan dengan capaian 101,99%. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 76,87 poin di tahun 2024, dan 50,2 poin di tahun 2023, maka terjadi peningkatan masing-masing sebesar 6,14% dari tahun 2024 dan peningkatan 62,52% dari tahun 2023. Sementara pada tahun 2022 belum dilakukan penilaian. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi

Perbandingan realisasi kinerja sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin periode 2025-2029 dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.12 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 2

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6) =4/5*100*
2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Dearah	81,59 poin	85 poin	95,98 %

Sumber : Monev Capaian IKU Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2025

Capaian Meningkatnya IP-ASN Perangkat Daerah tahun 2025 memperoleh Nilai 81,59 poin dari target 80 poin yang ditetapkan dengan capaian 101,99%. Dibandingkan dengan Akhir Renstra Tahun 2029 dengan target 85 poin dengan tingkat kemajuan 95,98%, maka capaian sudah sangat baik.

Realisasi kinerja untuk IP-ASN Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2025 tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional/provinsi/ kab/kota lain karena sasaran ini juga tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) nya.

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Sasaran 2 dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Lain	% Capaian
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6) =4/5*100*
2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Dearah	81,59 poin	Tidak dapat diperbandingkan	-

Sumber : Monev Capaian IKU Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2025

Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan Indikator IP-ASN Perangkat Dearah tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.14
Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan terhadap Sasaran 2

No	Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Tahun 2025		Capaian
			Target	Realisasi	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
2	**MENINGKATNYA PROFESIONALISME ASN PERANGKAT DAERAH**	**INDEKS PROFESIONALISME ASN (IP-ASN) PERANGKAT DAERAH**	**80 poin**	**81,59 poin**	**101,99 %**
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ASN dengan capain kinerja >90%**	**100%**	**100%**	**100%**
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	**100%**	**100%**	**100%**
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	87%	87%	**100%**
1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	100%
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	100%
1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	100%
1.3.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100%
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100%
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan Baik	100%	100%	100%
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%

1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	3 unit	100%
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	2 unit	100%
1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	100%

Sumber : Monev Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2025

Faktor Pendukung Keberhasilan :

a. Secara umum IP-ASN Dinas Kominfo berhasil mencapai target melalui update data kompetensi ASN pada aplikasi MyASN,
b. Sebagian ASN mengikuti tugas belajar.

Faktor Penghambat :

a. Kurangnya minat ASN mengikuti tugas belajar,
b. ASN lebih banyak mengikuti peningkatan kompetensi yang bersifat klasikal seperti pelatihan, seminar, workshop, dan lain sebagainya dari pada diklat teknis.

Secara umum kinerja sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dinilai telah berhasil mencapai target yang didukung dengan Melakukan Fasilitasi layanan dan pembinaan kinerja pegawai dan Fasilitasi pelayanan kesekretariatan dan operasional pendukung kepegawaian disamping itu perlu alternatif solusi yang dilakukan dengan mendorong ASN untuk mengikuti

tugas belajar, mendorong ASN untuk mengikuti diklat teknis, dan monitoring ASN melakukan update data peningkatan kompetensi.

Gambar 3.3 : Bimtek Penilaian SPIP Terintegrasi dan Kepegawaian

3.1.3 Sasaran Strategis 3 "Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)"

Sasaran kinerja Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut :

Tabel 3.15
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
3	Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) $Indeks\ SPBE = \sum_{j=1}^{n} ND_j \times BD_j$ dimana: NDj : nilai indeks domain ke-j BDj : nilai bobot domain ke-j	Domain 1. Kebijakan SPBE = 13% 2. Tata Kelola SPBE = 25% 3. Manajemen SPBE = 16,5% 4. Layanan SPBE = 45,5%

Sumber : PERMENPAN-RB Nomor 59 Tahun 2020

Penetapan bobot Penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diatas berpedoman pada PERMENPAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pedoman MENPAN-

RB Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Untuk Area penilaian SPBE Kabupaten Tapin Tahun 2024 secara rinci dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.16 Komponen Penilaian Sasaran 3

SPBE	***3,95***
Domain Kebijakan SPBE	**3,60**
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,60
Domain Tata Kelola SPBE	**3,60**
Perencanaan Strategis SPBE	3,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	4,50
Penyelenggara SPBE	3,00
Domain Manajemen SPBE	**2,73**
Penerapan Manajemen SPBE	2,75
Audit TIK	2,67
Domain Layanan SPBE	**4,69**
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,60
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,83

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber : LHE SPBE Kabupaten Tapin Tahun 2025

Dari target SPBE Kabupaten Tapin pada nilai 4,0 poin terealisasi pada nilai 3,95 poin (Sangat Baik) atau capaian kinerja 98,75% dengan kategori Sangat Tinggi di tahun 2026 dimana hasil ini sudah melebihi target.

Dari komponen penilaian diatas dapat digambarkan pada grafik capaian penilaian berikut dibawah ini :

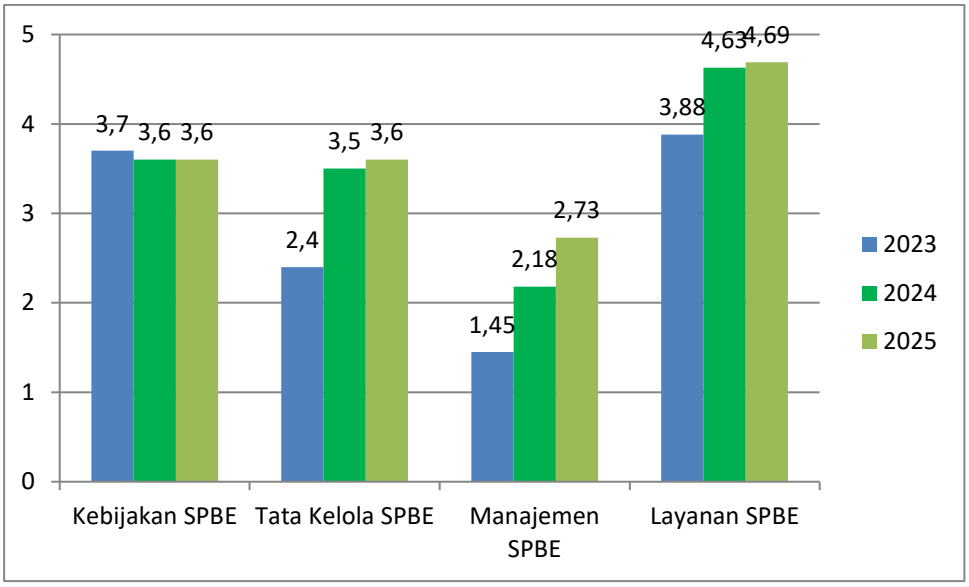

Grafik 3.5 Indeks SPBE Kabupaten Tapin

Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2025 berdasarkan Surat Menteri PAN-RB Nomor 633 B/76/M.PD.06/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penyampaian Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025, memperoleh nilai Indeks SPBE sebesar 3,95 poin dengan predikat Sangat Baik, hasil ini sudah berada mendekati target 4,0 poin dengan capaian kinerja 98,75%. Berdasarkan Hasil Evaluasi SPBE yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB tersebut.

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Tapin. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Tapin sudah dapat menggambarkan predikat Sangat Baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapin adalah pada penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek Perencanaan Strategis, Aspek TIK, Aspek Penyelenggara SPBE, Aspek Penerapan Manajemen SPBE, Aspek

Layanan Administrasi Pemerintahan dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya Peraturan Bupati No 16 Tahun 2022 sebagai dasar hukum pengaturan Arsitektur SPBE, penerapan Layanan Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, dan Tim Koordinasi SPBE.

Keunggulan kebijakan tata kelola juga diiringi dengan Perencanaan strategis dengan adanya Arsitektur SPBE yang telah direviu, penerapan TIK yang terdokumentasi dengan baik, sudah didukung dengan prosedur yang berlaku, dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja serta dikonsultasikan dengan unit pengelola TIK. Pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE.

Pada penerapan Aspek Layanan Adminstrasi Pemerintahan terlihat adanya pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai pada bidang perencanaan, penganggaran, keuangan melalui penerapan SIPD, pengadaan barang dan jasa melalui penerapan SPSE/LPSE, pemanfaatan layanan dan kearsipan melalui Srikandi, Layanan Akuntabilitas kinerja menggunakan aplikasi ESAKIP sehingga secara administratif dapat terinventarisasi dan terdokumentasi secara baik. Pemanfaatan layanan tersebut sudah sangat baik, bahkan untuk beberapa layanan sudah mencapai level optimal.

Penerapan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik telah memanfaatkan aplikasi SP4N LAPOR untuk layanan pengaduan pelayanan publik, pemanfaatan JDIH untu Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Namun disisi lain, kebijakan internal peta rencana SPBE belum memuat seluruh muatan peta rencana SPBE, kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE belum mengatur seluruh siklus pembangunan aplikasi. Rencana dan Anggaran SPBE sebagian dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK. Proses bisnis

telah disusun namun belum terlihat adanya perbaikan sebagai bentuk penerapan inovasi proses bisnis. Tim koordinasi SPBE telah terbentuk namun tugas/ program kerja belum dilaksanakan seluruhnya.

Beberapa aspek berikut perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan: Aspek perencanaan strategis SPBE sudah memenuhi, terutama pada rencana dan anggaran SPBE perlu dilakukan reviu dan optimalisasi. Pada aspek penerapan manajemen SPBE perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan audit TIK perlu menjadi perhatian, dalam hal pelaksanaan audit memanfaatkan tools yang disediakan oleh BRIN dan juga bekerjasama dengan BSSN sehingga dengan dilaksanakannya audit TIK dapat memperoleh gambaran kondisi penerapan SPBE. Sehingga pada akhirnya saat pelaksanaan evaluasi selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target.

Perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2025)		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
2	Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapin	2,29 poin	3,09 Poin	3,81 poin	4 poin	3,95 poin	98,75%

Sumber : Monev Capaian IKU Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2022-2025

Dari tabel capaian sasaran diatas dapat digambarkan kedalam grafik berikut dibawah ini :

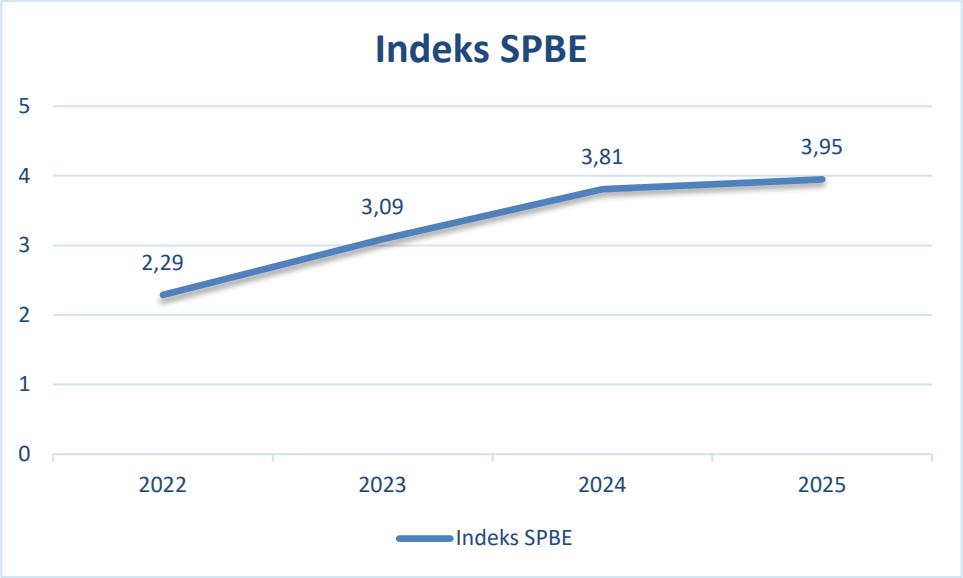

Grafik 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Indeks SPBE

Dari target SPBE Kabupaten Tapin di Level nilai 4,0 poin terealisasi dengan tingkat realisasi 3,95 poin (Sangat Baik) dengan capaian 98,75 % di tahun 2025. Dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya masing-masing dengan nilai 3,81 poin pada tahun 2024, nilai 3,09 poin tahun 2023, dan realisasi tahun 2022 dengan nilai 2,29 poin, maka terjadi peningkatan masing-masing sebesar 3,67% dari tahun 2024, selanjutnya 27,83% dari tahun 2023 dan peningkatan sebesar 72,48% dari tahun 2022. Tren peningkatan hingga tahun 2025 ini merupakan realisasi tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Upaya yang dilakukan Dinas Kominfo bersama Tim SPBE Kabupaten yaitu mengoptimalkan layanan administrasi berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dan berdaya guna. Langkah ini untuk mendukung percepatan penerapan SPBE secara keseluruhan. Salah satu aspek penting yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu sistem pemerintahan era modern saat ini yaitu terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik (SPBE) yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pedoman evaluasi pelaksanaannya diatur dalam

Permenpan-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Perbandingan realisasi kinerja sasaran Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin periode 2025-2029 dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.18
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 3

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6) =4/5*100*
3	Meningkatnya indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,95 poin	4,4 poin	89,77%

Sumber : Monev Capaian IKU Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2025

Dari tabel tersebut, dapat dilihat Capaian dari Meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di level nilai 4,0 poin terealisasi dengan tingkat realisasi 3,95 poin (Sangat Baik) dengan capaian 98,75 % di tahun 2025. Dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 dengan nilai 4,4 poin dengan tingkat kemajuan 89,77%, maka capaian ini sudah sangat baik.

Perbandingan realisasi kinerja Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2025 dengan standar nasional/provinsi diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.19
Perbandingan Capaian Sasaran 3 dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Lain	% Capaian
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6) =4/5*100*
3	Meningkatnya indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,95 poin	Nasional : 3,23 poin	Nasional : 122,29%

Sumber : Monev Capaian IKU Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2025

Dari tabel capaian sasaran diatas dapat digambarkan kedalam grafik berikut dibawah ini :

Grafik 3.7 Indeks SPBE Tahun 2025

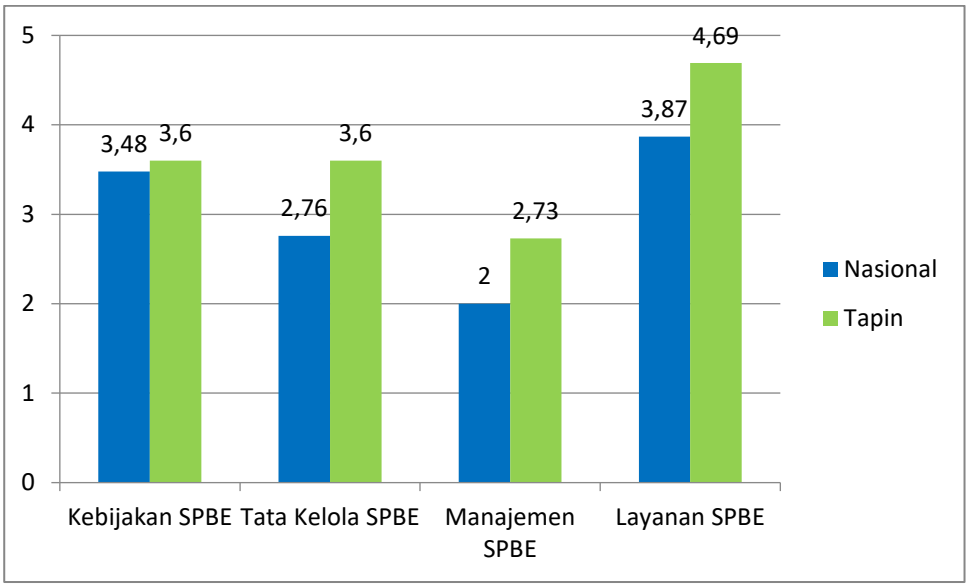

Sumber: (Data Diolah) LHE SPBE Tahun 2025

Jika dibandingkan dengan capaian indeks SPBE nasional Tahun 2025 mencapai tingkat kematangan 3,23 poin, dimana pada setiap Domain penilaian terlihat bahwa capaian Indeks SPBE Kabupaten Tapin sudah berada diatas Indeks Nasional dengan capaian 122,29% dan hal ini tentunya cukup menggembirakan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029. Instrumen Pemantauan dan Evaluasi

SPBE mengalami perubahan dengan lebih menekankan pada penilaian kepuasan pengguna, keandalan, dan keterpaduan layanan digital pada tahun 2026 menjadi Indeks Pemerintah Digital. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Transformasi Digital Pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Sehubungan dengan informasi tersebut, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyesuaikan target Indeks tersebut sesuai dengan RPJMN.

Nilai indeks SPBE berdasarkan indikator instrumen Permenpanrb 59/2020 akan mengalami penurunan apabila dilakukan konversi terhadap instrumen yang baru, dimana 40% indikator pada instrumen baru merupakan unsur-unsur penerapan kerangka kerja pemerintah digital, sehingga untuk indikator-indikator tersebut digunakan pendekatan imputasi untuk mengetahui nilai forecasting. Target yang diharapkan pada Indeks Pemerintah Digital 1,7 poin pada tahun 2026 dan 2,0 pada tahun 2029.

Keberhasilan capaian Sasaran 3, dengan Indikator Nilai Indeks SPBE Kabupaten Tapin tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.20
Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan terhadap Sasaran 3

No	Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan	Indikator	Tahun 2025		Capaian
			Target	Realisasi	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
3	**MENINGKATNYA INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)**	**NILAI INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KABUPATEN TAPIN**	**4 poin**	**3,95 poin**	**98,75%**
2	**Program Informasi dan Komunikasi Publik**	**Persentase peningkatan jasa publikasi daerah**	**80%**	**89%**	**111,25 %**
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat	**92%**	**89%**	**96,74%**

		terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah			
		Persentase ketersediaan data informasi publik yang di sediakan	**96%**	**96%**	**100%**
		Persentase aduan masyarakat yang ditindak lanjuti pada Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor)	**92%**	**103%**	**111,96 %**
2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah jam tayang	92%	102%	110,87%
		Persentase admin PPID yang ditingkatkan kapasitasnya	88%	88%	100%
		Persentase pejabat penghubung yang mendapatkan Monev Aplikasi SP4N Lapor	91%	91%	100%
		Persentase kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibina	56%	56%	100%
2.1.1	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media yang terdaftar di Dinas Kominfo	5 media	5 media	100%
2.1.2	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang aktif di Dinas Kominfo	1 komunitas	1 komunitas	100%
2.1.3	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diminta	3 permohonan	3 permohonan	100%
2.1.4	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan	Jumlah Aduan masyarakat yang	40 aduan	60 aduan	150%

	Aspirasi Publik	diterima melalui Aplikasi SP4N LAPOR			
2.1.5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media yang dikelola oleh Dinas Kominfo	4 media	4 media	100%
2.1.6	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang mengikuti bimtek/ pelatihan	4 orang	4 orang	100%
3	**Program Aplikasi Informatika**	**Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE**	**3**	**3**	**100%**
		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan intra yang dikelola oleh Diskominfo	**78%**	**73%**	**93,59%**
		Persentase aplikasi yang sudah terintegrasi	**80%**	**75%**	**93,75%**
3.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	75%	75%	100%
3.1.1	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	10 layanan	10 layanan	100%
3.2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa / kelurahan bebas low spot (sinyal lemah)	62%	61%	98,38%
		Persentase kualitas akses internet dengan kecepatan rata-rata 50 Mbps	72%	72%	100%
		Persentase wifi publik yang disediakan untuk Masyarakat	43%	43%	100%
		Persentase server sesuai standar	71%	71%	100%
3.2.1	Koordinasi	Jumlah Dokumen	1	1	100%

	pelaksanaan Manajemen SPBE	Evaluasi pelaksanaan Manajemen SPBE	dokumen	dokumen	
3.2.2	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra yang disediakan oleh Dinas Kominfo	21 perangkat daerah	21 perangkat daerah	100%
3.2.3	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	4 dokumen	4 dokumen	100%
3.2.4	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan pelaksanaan manajemen SPBE	12 laporan	12 laporan	100%
3.2.5	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi yang dibangun atau dikembangkan oleh Dinas Kominfo	1 aplikasi	1 aplikasi	100%
3.2.6	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Wifi Publik yang dikelola Dinas Kominfo	3 dokumen	3 dokumen	100%
4	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Indeks pembangunan Statistik (IPS)**	**2,63 poin**	**2,63 poin**	**100%**
		Persentase data statistik sektoral yang berkualitas	**70%**	**63%**	**90%**
		Persentase data statistik sektoral yang disediakan tepat waktu	**90%**	**90%**	**100%**
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang telah mendapat Bimtek/Desk Statistik Sektoral	64%	64%	100%
		Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan Data Sektoral	100%	100%	100%
		Persentase Perangkat Daerah	100%	100%	100%

		yang di Monev Statistik Sektoral			
4.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan bimtek/pelatihan di bidang statistik	120 orang	120 orang	100%
4.1.2	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah Laporan Kegiatan Satu Data Indonesia	1 laporan	1 laporan	100%
5	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**Tingkatnya Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah)**	**66%**	**30%**	**45,45%**
		Persentase SDM yang memiliki sertifikat keamanan informasi	**47%**	**47%**	**100%**
		Jumlah Kegiatan Computer Security Incident Response Team (CSIRT)	**92%**	**92%**	**100%**
		Persentase titik Pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi PHKS yang teramankan	**20%**	**20%**	**100%**
5.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Tata Kelola Pengamanan Informasi pada website SANAPATI	86%	126%	146,51 %
		Persentase SDM yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik Sesuai Permohonan	92%	92%	100%
		Persentase peserta yang mendapatkan nilai diatas passing grade	88%	88%	100%
		Persentase perangkat daerah yang melakukan Pengelolaan aset informasi sesuai dengan peraturan	43%	43%	100%
5.1.1	Pelaksanaan	Jumlah Laporan	8 laporan	8 laporan	100%

	Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah			
5.1.2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Tanda Tangan Elektronik	54 perangkat daerah	54 perangkat daerah	100%
5.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Tata Kelola Pengamanan Informasi pada website SANAPATI	86%	126%	146,51 %
5.2.1	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	54 perangkat daerah	10 perangkat daerah	18,51%

Sumber : Monev Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2025

Faktor Pendukung Keberhasilan :

a. Kepedulian pimpinan dan kompetensi teknis SDM yang dimiliki dalam bidang teknologi informasi sehingga layanan digital dapat dimanfaatkan secara optimal,
b. Pengembangan layanan digital yang berfokus pada peningkatan kualitas penerapan layanan digital pemerintah daerah untuk akselerasi transformasi digital di tahun selanjutnya,
c. Indeks SPBE telah berhasil mencapai target dengan adanya kebijakan Arsitektur SPBE, penerapan Layanan Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP),
d. Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dan Agen Siber secara rutin melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang masuk (log) untuk mngidentifikasi potensi risiko keamanan data,
e. Perbaikan Indeks Pembangunan Statistik (IPS), Penyelenggaraan Statistik Sektoral terintegrasi, Penyelenggaraan Satu Data.

Faktor Penghambat :

a. Masih adanya ego sektoral yang mengakibatkan banyaknya aplikasi mandiri di setiap Perangkat Daerah yang sulit diintegrasikan.
b. Ancaman keamanan siber yang semakin tinggi membutuhkan peningkatan infrastruktur dan kebijakan pengamanan data yang belum sepenuhnya merata di seluruh perangkat daerah.
c. Jaring Komunikasi Sandi (JKS) Pemerintah Daerah melalui penggunaan Aplikasi Cyberchat oleh BSSN belum dapat dilaksanakan sebagaimana surat pemberitahuan penundaan permohonan fasilitasi Aplikasi dan Akun Cyberchat dari BSSN.

Secara umum kinerja sasaran Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dinilai telah berhasil mencapai target yang didukung dengan kegiatan :

1. Konektifitas Jaringan Fiber Optic

Konektifitas Jaringan Fiber Optik meliputi wilayah Perkantoran Setda, Diskominfo, Disdukcapil, BKAD, DPMPTSP, Bappelitbang, Mall Pelayanan Publik, BPBD, Satpol PP, Dispustarsip, Dinsos, Bagian PBJ, BAPPENDA, Pendopo Galuh Bastari Tapin, dan 12 Kecamatan. Meskipun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap namun diiharapkan dengan adanya jaringan ini dapat meningkatkan sistem layanan kepemerintahan (e-Government) yang terintegrasi yang mampu menciptakan sistem e-Government Daerah dan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik. Kemudian juga penyediaan server untuk penunjang pelaksanaan TPP ASN untuk aplikasi GOVEM.

Gambar 3.4 : Jaringan Fiber Optic

2. Integrasi Aplikasi Layanan Publik

Layanan Publik yang dikelola Dinas Kominfo yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi yang prosesnya saling terhubung dan menyatu ke dalam beberapa layanan SPBE lainnya ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE ada 15 layanan dari 15 layanan publik atau 100%, yaitu ESAKIP-NG terintegrasi dengan dan PADARINGAN, Web Profile terintegrasi dengan Tapinkab, TPP Online terintegrasi dengan SIMPEG, Tapinkab terintegrasi dengan PORTAL TAPIN, E-TAMASA terintegrasi dengan ESAKIP-NG dan SIMPEG, TIK terintegrasi dengan SIMPEG, E-OFFICE terintegrasi dengan SIMPEG, SIDAK terintegrasi dengan SIMPEG, Govem terintegrasi dengan Tapinkab, JDiH terintegrasi dengan Tapinkab, Tapin Mesra terintegrasi dengan Tapinkab, SIPaT terintegrasi dengan Tapinkab.

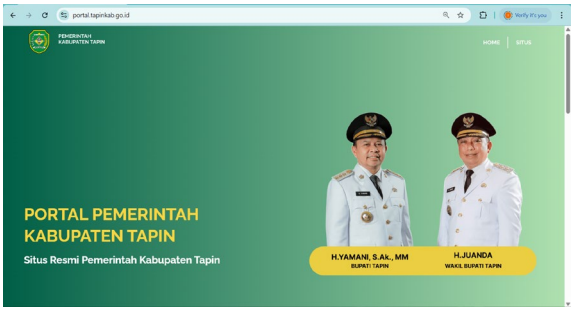

Portal Tapin

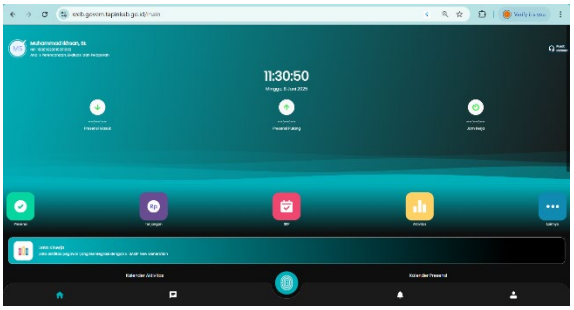

Govem (Aplikasi TPP)

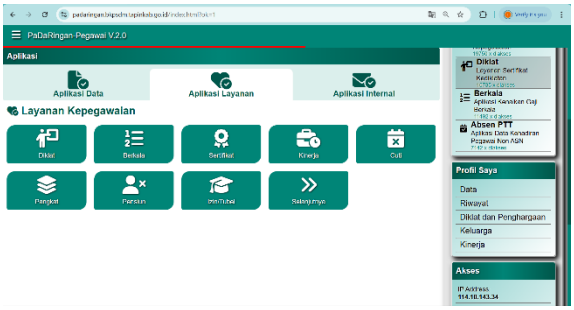

Padaringan (Layanan Kepegawaian)

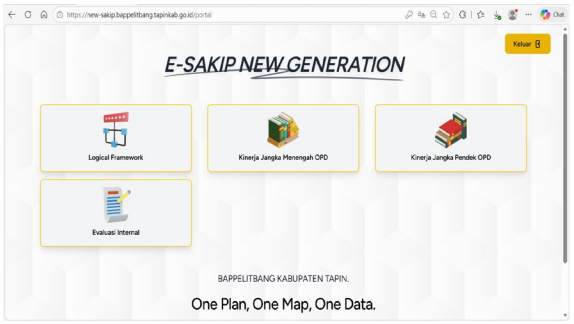

e-SAKIP (SAKIP Online)

SapaTapin (Informasi Pegawai)

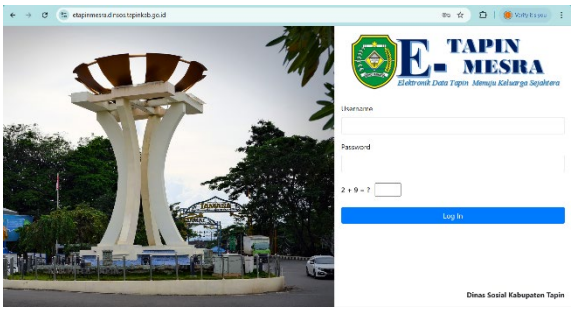

E-Tapin Mesra (Data Sosial Keluarga)

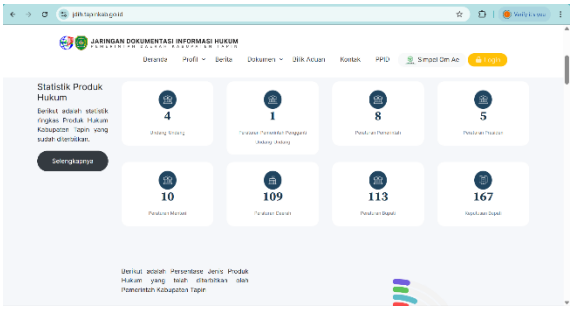

JDIH (Informasi Produk Hukum)

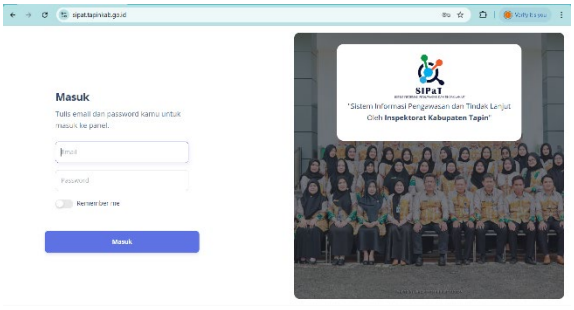

SIPAT (Informasi Pengawasan APIP)

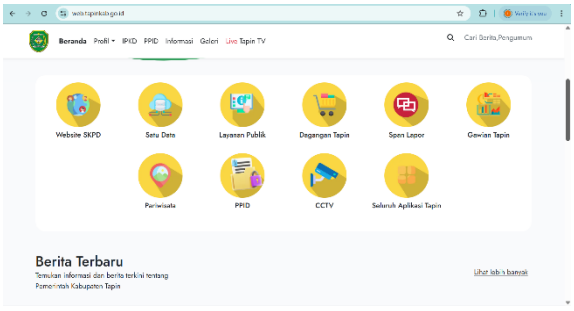

Web.tapinkab.go.id (Domain)

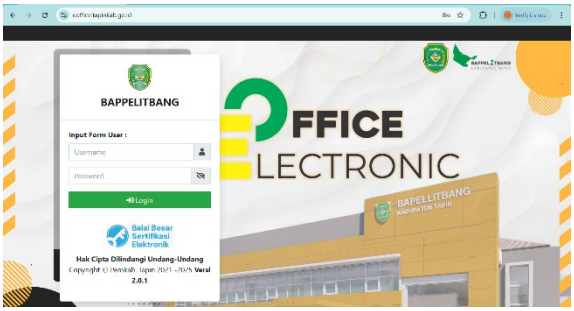

e-Office

Gambar 3.5 : Aplikasi Layanan Terintegrasi

3. Penyediaan Wifi Publik dan CCTV Kabupaten

Jumlah Wifi Publik yang tersedia saat ini ada 3 titik yang berlokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rantau Baru, Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) yang berada di Jalan MTQ, dan Lapangan Tenis Putra Tapin. Ketercapaian penyediaan dan pemeliharaan Wifi Publik tahun 2025 terealisasi dari target 3 titik dengan Tingkat capaian 100%. Selanjutnya Jumlah CCTV Kabupaten Tapin seluruhnya berjumlah 26 titik yang tersebar pada lokasi berikut :

Tabel 3.21 Lokasi CCTV Publik

No	Lokasi	Jumah	Tahun
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Simpang 4 Datu Nuraya (Terminal)	1	2021
2	Simpang 4 Datu Suban (Tugu dua jari)	1	2021
3	Bundaran Rantau Baru	1	2021
4	Bundaran Sirang Pitu	1	2021
5	Lapangan Dwi Dharma	1	2021
6	Bundaran Dulang	1	2021
7	Simpang Transat Binuang	1	2024
8	Simpang 3 RTH	1	2024
9	Simpang 4 Bungur arah PDAM	1	2024
10	Simpang 4 Transat	1	2024
11	Jalan Margasasri Simpang datu Qabul	1	2024
12	Simpang 3 Masjid Lokpaikat	1	2024
13	Simpang 3 Banua Padang	1	2024
14	Perbatasan Tapin Batola	1	2024
15	Simpang 3 Masjid Polres Tapin	1	2024
16	Simpang 3 Pandahan	1	2024
17	Simpang Kecamatan Tapin Selatan	1	2024
18	Tungkap Pintu Masuk Tapin	1	2024
19	Arah Kecamatan Binuang	1	2024
20	Perbatasan Tapin HSS	1	2024
21	Simpang 3 Serawi	1	2024
22	Simpang 3 RSUD Datu Sanggul	1	2024
23	Pos Lantas Margasari	1	2024
24	Jalan Margasai Simpang Balimau	1	2024

25	Bundaran Bungur	1	2024
26	Simpang Jalan Kesehatan	1	2024
	Jumlah	**26**	

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Tapin Tahun 2025

Pengembangan penyediaan CCTV pada tahun 2024 sebanyak 20 titik pada lokasi 12 Kecamatan (seluruh kecamatan)

4. Monitoring dan Evaluasi SPBE

Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE dengan SKPD pengampu SPBE antara lain BKAD, BKPSDM, Bappelitbang, Inspektorat, BPBD, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, DPMPTSP, Bagian Barang dan Jasa, Disdukcapil, Disputarsip, dan Dinsos. Melakukan pendampingan berkelanjutan kepada Perangkat Daerah terkait Implementasi SPBE dan review Arsitektur SPBE sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin telah bekerjasama dengan Inixindo Yogyakarta untuk pendampingan berkelanjutan kepada Perangkat Daerah terkait Implementasi SPBE serta melakukan review Arsitektur SPBE sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam tahapan pendampingan terdapat capaian capaian yang telah dilakukan untuk mendukung penyiapan, pengembangan dan penerapan SPBE di Kabupaten Tapin. Hal ini akan terkorelasi pada peningkatan indeks SPBE yang akan diinput pada penilaian mandiri 2025 ataupun evaluasi umum pada 2026.

Gambar 3.6 : Koordinasi Evaluasi SPBE dan Pendampingan Arsitektur SPBE

Monitoring dan evaluasi SPBE ini sekaligus menjelaskan pentingnya SPBE untuk menciptakan tata Kelola pemerintahan yang efisien dan akuntable berbasis elektronik serta bagaimana peran perangkat daerah dalam pengembangan SPBE.

Pada tahun perencanaan selanjutnya fokus pemerintah daerah adalah menuju Pemerintah Digital sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029 oleh karena itu pengembangan layanan digital berfokus pada peningkatan kualitas penerapan layanan digital pemerintah daerah untuk akselerasi transformasi digital. Digitalisasi pemerintahan agar pelayanan publik dapat dilakukan secara cepat dan efisien, sehingga memberikan kepuasan terhadap publik yang menerima layanan pemerintahan secara umum.

5. Layanan Konten Berita

Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik melalui konten berita media facebook, Instagram, dan laman tapinkab.go.id. serta media sosial Youtube. Adapun rekapitulasi berita media online Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22 Rekap Berita Media Online Tahun 2025

No.	Bulan	Ig	Fb	Website	Kerjasama Media Online	Tapin Tv
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Januari	27	28	-	80	1001
2	Februari	33	37	-	80	737
3	Maret	74	84	-	80	757
4	April	42	49	-	80	658
5	Mei	50	61	-	80	1139
6	Juni	45	67	13	80	947
7	Juli	84	75	82	80	1116
8	Agustus	55	69	101	80	1481
9	September	42	70	89	80	1722
10	Oktober	143	124	228	90	989
11	November	114	117	196	90	-
12	Desember	65	82	114	90	-
	Jumlah	**774**	**863**	**823**	**990**	**10547**

Sumber : Dinas Kominfo Kab. TapinTahun 2025

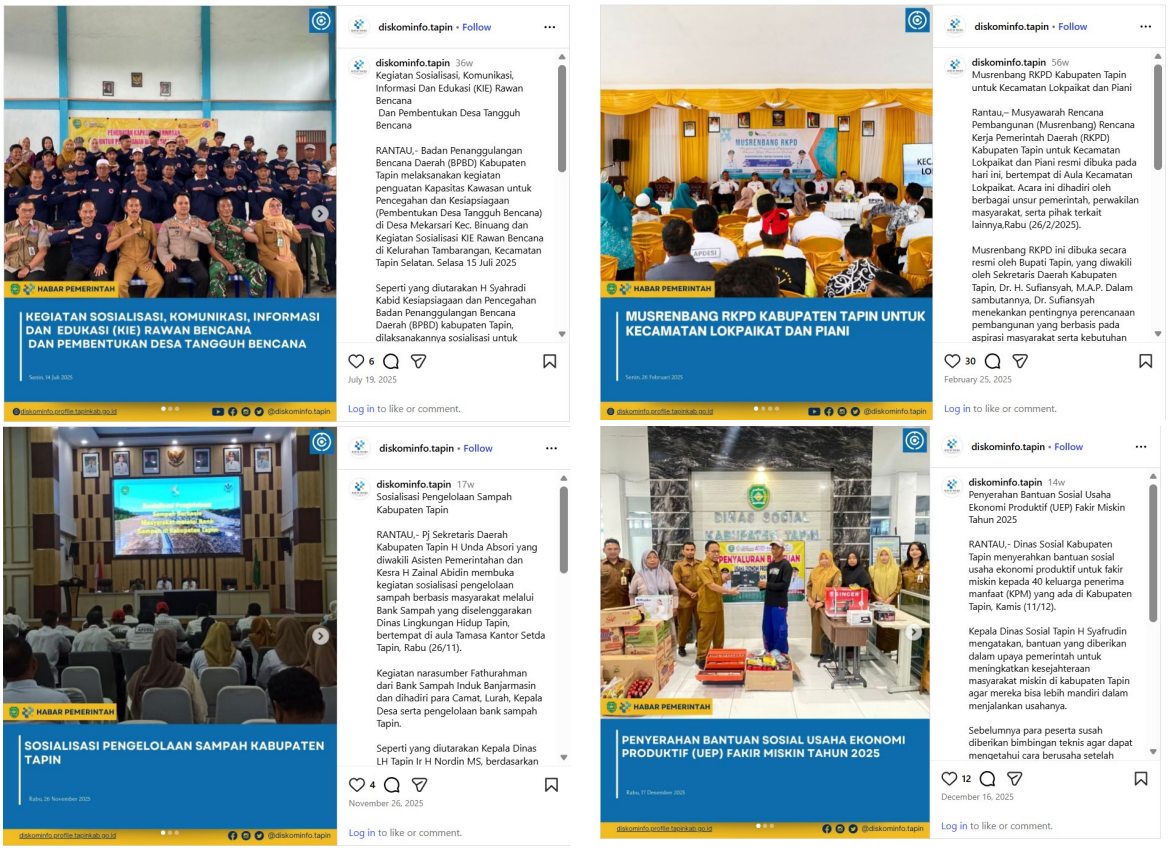

Gambar 3.7 : Konten Berita Pada Media Facebook Dan Instagram

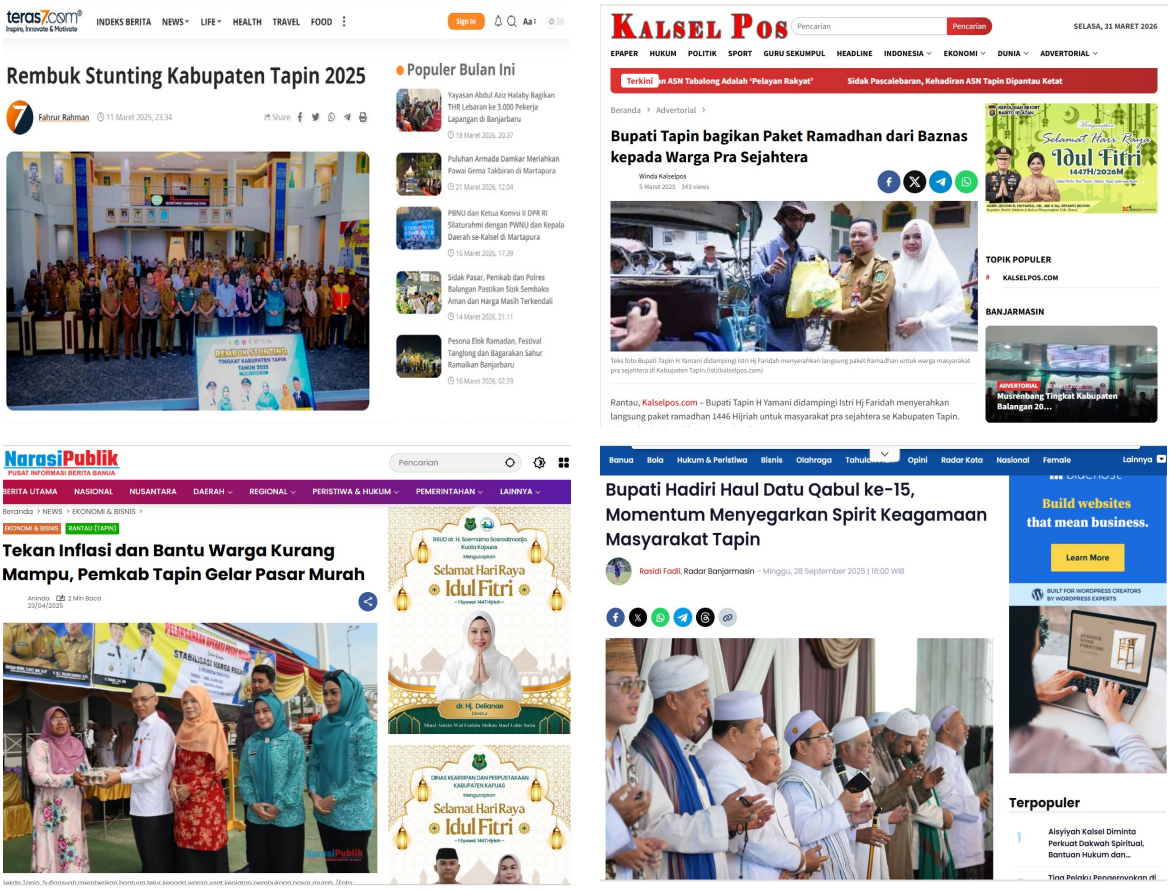

Gambar 3.8 : Konten Berita Pada Media Elektronik Online

6. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat

Perkembangan jumlah KIM yang telah dibentuk dan difasilitasi pembinaannya oleh Dinas Kominfo hingga sekarang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23
Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat Berdasarkan Status
Tahun 2025

No	Status KIM	Jumlah	Persentase
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	KIM aktif	14	82,35%
2	KIM tidak aktif	3	17,65%
	Total	**17**	**100%**

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2025

Terdapat 3 kelompok KIM yang dikategorikan tidak aktif, hasil evaluasi menunjukkan bahwa hal ini terjadi karena

anggota masyarakat kurang memahami pentingnya mengelola dan menyebarkan informasi, kurangnya jaringan pembinaan berkesinambungan, ditambah kesibukan bekerja yang mengurangi waktu untuk berorganisasi. Indikasi adanya dominasi tokoh tertentu seringkali hanya mengandalkan satu atau dua orang saja.

Tahun 2025 Dinas Kominikasi dan Informatika melaksanakan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas melalui pembinaan pada 8 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yaitu KIM Habar Bahari desa Banua Halat Kiri, KIM Pudarta desa Hiyung, KIM Warta Kampung desa Andhika, KIM Habar Warga desa Sawang, KIM Buncu Habar desa Hatiwin, KIM Habar Banua desa Suka Ramai, KIM Karya Digital Desa Salam Babaris.

Gambar 3.9 : Fasilitasi Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

7. Kerjasama Layanan Hubungan Media

Kerjasama Layanan Hubungan Media melalui pembuatan video promosi daerah, Kerjasama Publikasi Pemberitaan dengan LPPL Tapin TV, Kerjasama Publikasi/Kehumasan dengan Media Elektronik Online, dan Kerjasama Publikasi/Kehumasan dengan Media Cetak Lainnya. Adapun kerjasama layanan media Dinas Kominfo pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24 Kerjasama Layanan Hubungan Media

No	Kerja Sama	Nama Media	Nomor	Tahun
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Publikasi Pemberitaan	Mata Banua	500.12.13.2/004.c/Mou/Diskominfo/I/2025	4/1/2025
2	Publikasi Pemberitaan	Radar Banjarmasin	500.12.13.2/004.g/Mou/Diskominfo/I/2025	4/1/2025
3	Publikasi Pemberitaan	Kalsel Post	500.12.13.2/004.f/Mou/Diskominfo/I/2025	5/1/2025
4	Publikasi Pemberitaan	Bakabar.com	500.12.13.2/004.b/Mou/Diskominfo/I/2025	5/1/2025
5	Publikasi Pemberitaan	Poros Kalimantan	500.12.13.2/004.h/Mou/Diskominfo/I/2025	5/1/2025
6	Publikasi Pemberitaan	Teras 7	500.12.13.2/004.i/Mou/Diskominfo/I/2025	5/1/2025
7	Publikasi Pemberitaan	Tabir Kota	500.12.13.2/004.j/Mou/Diskominfo/I/2025	5/1/2025
8	Publikasi Pemberitaan	Narasi Publik.net	500.12.13.2/004.k/Mou/Diskominfo/I/2025	5/1/2025
9	Publikasi Pemberitaan	Apa Kabar	500.12.13.2/136/Diskominfo/VII/2025	28/7/2025

Sumber : Dinas Kominfo Kab. TapinTahun 2025

8. Penyediaan Layanan Aduan Masyarakat (SP4N LAPOR!)

Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik pada tahun 2025 mendapati 60 aduan yang masuk kedalam portal SP4N LAPOR. Aduan tersebut Sebagian besar terkait jalan, air minum, kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, trantibum dan kerawanan sosial, kepegawaian, dan lainnya.

Tabel 3.25
Rekapitulasi Aduan Di Aplikasi LAPOR Berdasarkan Klasifikasi Aduan Tahun 2025

No	Klasifikasi Aduan	Jumah
(1)	*(2)*	*(3)*
1	Fasilitas dan layanan kesehatan	26
2	Sarana prasarana infrastruktur lainnya	6
3	Trantibum	5
4	Kerawanan sosial	5
5	Layanan umum lainnya	4
6	Sarana prasarana TIK	3
7	Layanan air minum	2
8	Kritik pembangunan	2
9	Ketenagakerjaan	2
10	Administrasi kepegawaian	2
11	Kegawatdaruratan	1
12	Penambangan ilegal	1
13	Tarif parkir	1
	Jumlah	**60**

Sumber : Dinas Kominfo Kab. TapinTahun 2025

Terkait dengan berbagai aduan tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan koordinasi dan monitoring bersama admin penghubung SP4N LAPOR dari setiap perangkat daerah agar pengelolaan Layanan SP4N LAPOR ini terus berjalan secara optimal sebagai aplikasi resmi pemerintah. Selanjutnya bagaimana perangkat daerah dapat menindaklanjuti aduan masyarakat secara cepat, tepat, dan transparan.

Gambar 3.10 : Koordinasi dan Monitoring SP4N LAPOR!

9. Penyediaan Data Informasi Publik

Indikator ini diperoleh melalui sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik yaitu Persentase wilayah yang menerima penyebarluasan informasi melalui kegiatan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dimana tugas Pengelola PPID yaitu pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu, dengan capaian kinerja 100% dari target 3 Dokumen dan terealisasi 3 Dokumen.

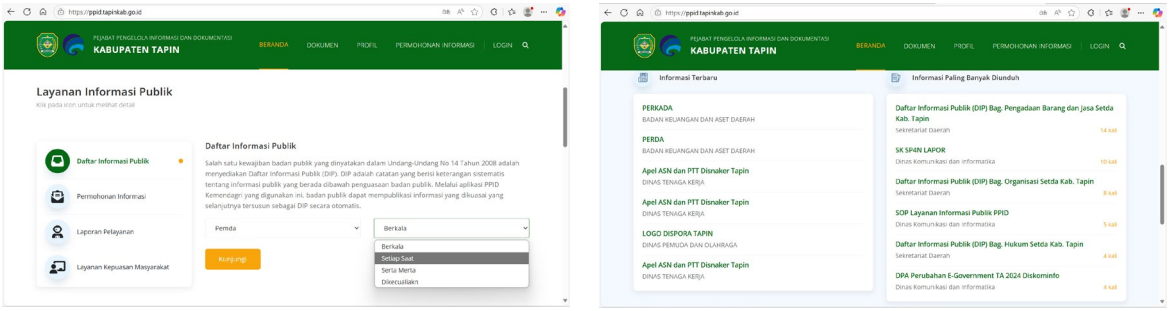

Gambar 3.11 : Layanan Informasi Publik

Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan bimbingan teknis Penyusunan DIP (Daftar Informasi Publik) sebagai bentuk optimalisasi pengelolaan PPID di Kabupaten Tapin.

10. Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Dinas Komunikasi dan Informatika telah mempersiapkan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) melalui rapat koordinasi dan pembinaan intensif terhadap SKPD sampel, locus EPSS tahun 2025 yaitu Bappenda dan DP3A. Penilaian mandiri EPSS secara tentatif oleh BPS dijadwalkan mulai minggu pertama April 2026 dan hasil EPSS disampaikan pada bulan September 2026.

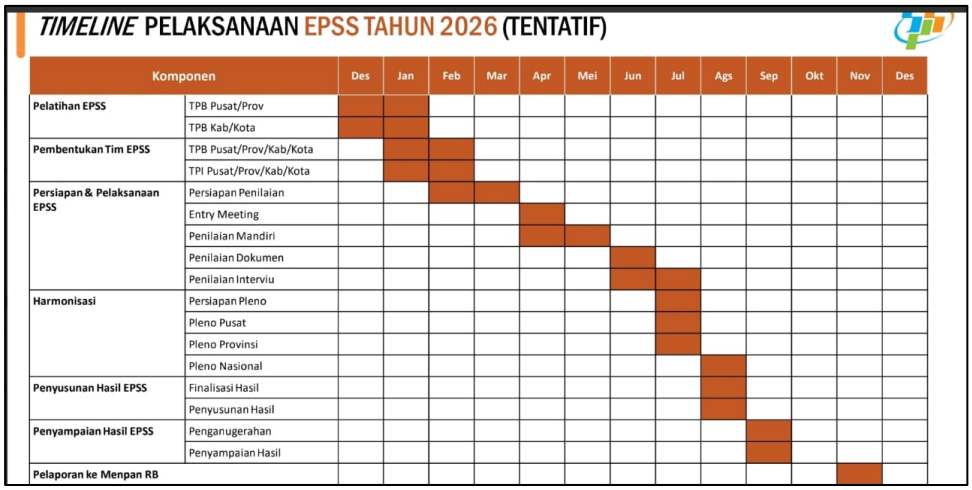

Gambar 3.12 : Timeline Pelaksanaan EPSS Tahun 2026

Penilaian EPSS Tahun 2025 ke 2026 juga memperhatikan rekomendasi hasil tahun sebelumnya, berdasarkan Hasil EPSS Tahun sebelumnya, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2024 adalah 2,63 dengan predikat "Baik". Rincian hasil penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26 Nilai Indeks Pembangunan Statistik

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Prinsip SDI	28%	2,6	2,43	2,25
Kualitas Data	24%	2,6	2,27	3,00
Proses Bisnis Statistik	19%	2,6	2,47	3,00
Kelembagaan	17%	2,6	2,32	2,74
Statistik Nasional	12%	2,6	2,20	2,01
Indeks Pembangunan Statistik	**100%**	**2,6**	**2,35**	**2,63**

Sumber : LHP EPSS Tahun 2024

Dimana pada hasil tersebut pemenuhan atas kualitas data dan standar proses bisnis statistik sudah dilakukan oleh seluruh perangkat daerah selaku produsen data, namun belum ada dokumen metadata variable dan indikator dari masing-masing kegiatan statistik sektoral, penerapan kelembagaan statistik juga belum maksimal sehingga perlu menerapkan kolaborasi dan kegiatan bersama-sama, dan dalam kaitan

dengan statistik nasional lokus hanya memiliki rancangan kegiatan statistik belum sampai ke tahap pengajuan rekomendasi statistik melalui aplikasi ROMANTIK untuk mendapatkan surat rekomendasi kegiatan statistik.

Dari kelemahan-kelemahan tersebut tahun 2025 Dinas Kominfo melaksanakan kegiatan Forum Satu Data Indonesia (SDI) untuk mengidentifikasi kebutuhan daftar data dan melakukan desk kepada perangkat daerah terkait daftar Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang akan dikumpulkan pada eWALIDATA dan Kegiatan Monev SDI yang merupakan bagian dari rencana aksi SDI tahun 2025, dan melaksanakan kegiatan monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang diikuti oleh BPS, Bappelitbang, Dinas Kominfo, dan lokus perangkat daerah.

Gambar 3.13 : Kegiatan Monev EPSS

11. Indeks KAMI (Keamanan Informasi)

Penggunaan dan publikasi hasil evaluasi Indeks KAMI merupakan bentuk tanggungjawab penggunaan dana publik sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran mengenai kebutuhan keamanan informasi. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target aspek keamanan informasi yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2022.

Perhitungan tingkat keamanan informasi pemerintah berdasarkan Indeks KAMI pada 5 area Tata kelola keamanan informasi, Pengelolaan resiko keamanan informasi, Kerangka kerja keamanan informasi, Pengelolaan aset informasi, Teknologi dan keamanan informasi saat ini menunjukan pada indeks nilai 274 dari 918 dengan capaian 29,85%. Sehingga tingkat kematangannya dikategorikan “Tidak Layak”.

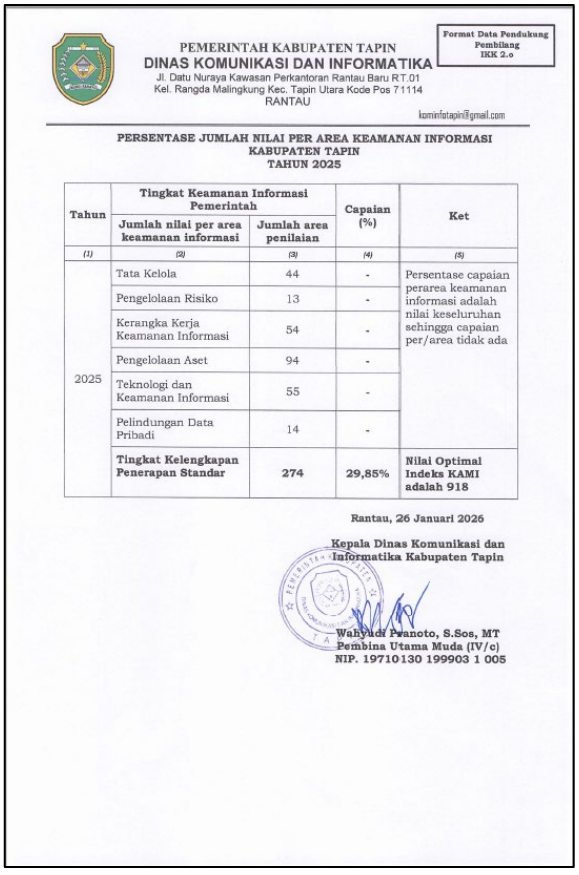

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru RT.01
Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kode Pos 71114
RANTAU
kominfotapin@gmail.com

Format Data Pendukung Pembilang IKK 2.0

PERSENTASE JUMLAH NILAI PER AREA KEAMANAN INFORMASI
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2025

Tahun	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah		Capaian (%)	Ket
	Jumlah nilai per area keamanan informasi	Jumlah area penilaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2025	Tata Kelola	44	-	Persentase capaian perarea keamanan informasi adalah nilai keseluruhan sehingga capaian per/area tidak ada
	Pengelolaan Risiko	13	-	
	Kerangka Kerja Keamanan Informasi	54	-	
	Pengelolaan Aset	94	-	
	Teknologi dan Keamanan Informasi	55	-	
	Pelindungan Data Pribadi	14	-	
	Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar	**274**	**29,85%**	**Nilai Optimal Indeks KAMI adalah 918**

Rantau, 26 Januari 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

Wahyudi Pranoto, S.Sos, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710130 199903 1 005

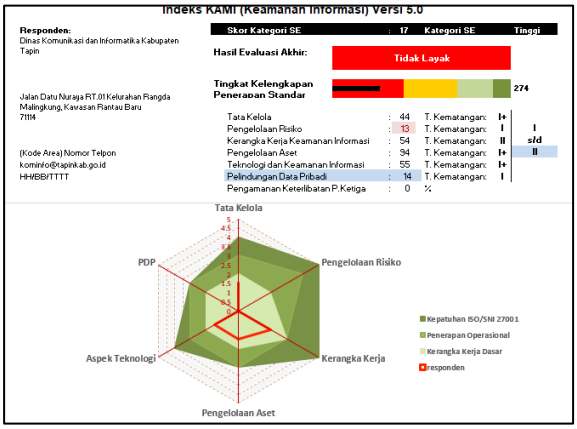

Gambar 3.14 : Indeks KAMI

Terjadi perbedaan/perubahan penilaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI) tahun 2025 menggunakan versi terbaru yaitu Indeks Keamanan Informasi versi 5.0 dimana nilai maksimal adalah 918 Poin sedangkan tahun sebelumnya pada saat menggunakan Indeks Keamanan Informasi versi 4.2 nilai maksimalnya adalah 645 Poin.

Sehingga hal ini menjadi fokus perbaikan kedepan, adapun saran/rekomendasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi kebutuhan kapasitas ideal personil keamanan informasi disesuaikan dengan beban kerja organisasi khususnya di bidang keamanan informasi atau keamanan SPBE,
2. Melakukan peningkatan kapasitas SDM keamanan seperti pelatihan dan bimbingan teknis dan/atau sertifikasi kompetensi secara berkelanjutan,
3. Melakukan literasi keamanan informasi berupa seminar/ webinar/ konten media sosial/ surat edaran secara rutin agar pegawai memiliki kesadaran yang tinggi terkait ancaman siber yang terus berkembang,
4. Menetapkan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi SPBE atau Kebijakan SMKI dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah,
5. Melaksanakan audit internal keamanan SPBE dengan melibatkan unit pengendalian internal (Inspektorat),
6. Melakukan vulnerability assessment atau penetration testing secara rutin terhadap semua sistem elektronik yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Tapin.

12. CSIRT (Computer Security Incident Response Team)

Dalam upaya perbaikan Tatakelola Keamanan Informasi Dinas kominfo melaksanakan kegiatan terkait penyusunan

kebijakan pembentukan CSIRT (Computer Security Incident Response Team) dan Agen Siber untuk pengamanan data di lingkup pemerintah Kabupaten Tapin. Pada pengelolaan Risiko Keamanan Informasi Dinas kominfo membuat SOP pengelolaan Manajemen Risiko Keamanan Informasi. Pada Kerangka Kerja Keamanan Informasi telah dibuat kebijakan yang mengatur mekanisme teknis terkait Disaster Recovery Plan.

Tabel 3.27 Kebijakan Keamanan Informasi

No	Nama Kebijakan	Bentuk	Nomor
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Tim Tanggap Insiden Siber (Computer Security Inciident Response Team) Kabupaten Tapin	Keputusan Bupati	188.45/250/KUM/2023
2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Tapin	Keputusan Bupati	100.3.3.2/163/KUM/2024
3	Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Keputusan Bupati	Kepbub Nomor : 100.3.3.2/266/KUM/2024
4	Sistem Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Keputusan Bupati	Kepbub Nomor : 100.3.3.2/268/KUM/2024
5	SOP Pengecualian Terhadap Prosedur Keamanan Informasi	SOP	000.8.3.3/268/Diskominfo/2023
6	SOP Indeks Keamanan Informasi	SOP	000.8.3.3/271/Diskominfo/2023
7	SOP Disaster Recovery Plan	SOP	000.8.3.3/272/Diskominfo/2023
8	SOP Penanganan Insiden Siber	SOP	000.8.3.3/011.g/Diskominfo/I/2024
9	SOP Penyusunan Kebijakan Keamanan Informasi	SOP	000.8.3.3/011.j/Diskominfo/I/2024
10	SOP Pengelolaan Manajemen Risiko Keamanan Informasi	SOP	000.8.3.3/011.k/Diskominfo/I/2024
11	SOP Pelaksanaan Kegiatan Cyber Threat Intelligent	SOP	000.8.3.3/003.h/Diskominfo/I/2025
12	SOP Penetration Testing/ Information Technology Secrurity Assessment (ITSA)	SOP	000.6 /143/Diskominfo/VII/2025

Sumber : Dinas Kominfo Kab. TapinTahun 2025

Dengan adanya Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/250/KUM/2023 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Computer Security Incident Response Team) Kabupaten Tapin.

maka Pemerintah Kabupaten Tapin telah memiliki lembaga yang menyediakan layanan dan dukungan kepada instansi untuk mencegah, mengelola dan menanggapi insiden keamanan informasi. Manfaat pembentukan Tim CSIRT ini yaitu dapat mengendalikan dampak seminimal mungkin sesuai dengan prosedur dan kebijakan untuk merespon dengan cepat dan efektif terhadap insiden keamanan dan untuk mengurangi risiko serangan siber.

Sepanjang Tahun 2025 Tim CSIRT telah menemukan insiden siber terhadap beberapa domain sebagai berikut :

Tabel 3.28 Insiden Siber Domain Tahun 2025

No	Nama Domain	Insiden	Status	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	https://talitarang.tapinkab.go.id/index.php/login/ajax_list_peraturan/	PHP Error	Aktif	Sudah ditangani
2	https://pondok.dukcapil.tapinkab.go.id/kedatangan/kirim	PHP Error	Aktif	Sudah ditangani
3	https://dagangan.tapinkab.go.id/borneo/?id_ID=SLOT-GACOR-HARI-INI-KAKEK-ZEUS	Web Defacement	Aktif	Sudah ditangani
4	https://simanja.tapinkab.go.id/selamat-judi/	Web Defacement	Aktif	Sudah ditangani
5	https://sipejantan.tapinkab.go.id/?sunhong=gacor	Web Defacement	Aktif	Sudah ditangani
6	https://pondok.dukcapil.tapinkab.go.id/	indexed defacement	Aktif	Sudah ditangani
7	https://dagangan.tapinkab.go.id/	indexed defacement	Aktif	Sudah ditangani
8	https://sipejantan.tapinkab.go.id/	Web Defacement	Aktif	Sudah ditangani
9	https://aset1.bpkad.tapinkab.go.id/	Web Defacement	Aktif	Sudah ditangani
10	https://bapenda.tapinkab.go.id	DOM XSS	Aktif	Sudah ditangani
11	https://www.sismakendi.dinkes.tapinkab.go.id/	Unauthorized System Access	Aktif	Sudah ditangani
12	https://padaringan.bkpsdm.tapinkab.go.id/phpinfo.php	bocor detail konfigurasi	Aktif	Sudah ditangani
13	https://opacdisputarsip.tapinkab.go.id/dashboard/phpinfo.php	bocor detail konfigurasi	Aktif	Sudah ditangani
14	https://talitarang.tapinkab.go.id/info.php	bocor detail konfigurasi	Aktif	Sudah ditangani
15	https://portal.tapinkab.go.id/	Misconfigur	Aktif	Sudah

		ation		ditangani
16	https://talitarang.tapinkab.go.id/info.php	Information Discloure	Aktif	Sudah ditangani
17	https://survei.dukcapil[.]tapinkab[.]go[.]id/git/config		Aktif	Sudah ditangani
18	https://www.csirt.tapinkab.go.id/dashboard/users	Cross-Site Scripting (XSS)	Aktif	Sudah ditangani
19	https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/repository	Cross-Site Scripting (XSS)	Aktif	Sudah ditangani
20	https://www.sismakendi.dinkes.tapinkab.go.id/		Aktif	Sudah ditangani

Sumber : Dinas Kominfo Kab. TapinTahun 2025

Dinas Kominfo pada tahun ini melaksanakan kegiatan Bimbingan teknis Agen Siber kepada Perangkat Daerah, dimana bimtek pada tahun 2025 bertujuan mengedukasi Perangkat Daerah untuk dapat mengenali tanda-tanda awal kebocoran data, memahami risiko yang muncul, dan melakukan tindakan mitigasi secara cepat serta tepat guna. Disimulasikan juga bagaimana Proses akuisisi data sederhana, mengidentifikasi sumber data, menyalin data secara aman, dan melakukan verifikasi hasil salinan untuk memastikan kesesuaian data dengan sumber.

Gambar 3.15 : Bimtek CSIRT Kabupaten Tapin

13. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Sejak pada tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin menyelenggarakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) melalui Perjanjian Kerjasama (PKS) Nomor : 555/156/PKS-TTE/DISKOMINFO/2021 dan PERJ.

232/BSSN/BS/ KH.02.01/ 10/2021. BSRe sebagai pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem sertifikasi elektronik, dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik mengenai pemanfaatan sertifikat elektronik.

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani. Selanjutnya pada Tahun 2025 ini Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan perpanjangan PKS.

Berikut daftar kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe):

Tabel 3.29
Kerjasama Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2025

No	Mitra Kerjasama	Nomor Kerjasama	Urusan Pemerintahan Yang Dikerjasamakan/ Manfaat	Jenis Perjanjian	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe)	000.7.5.3/145/PKS-TTE/DISKOMINFO/2025 PERJ. 3319/BSSN/BS/KJ.01.02/11/2025	PKS Antara Dinas Kominfo Kabupaten Tapin dengan BSRe tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin **Manfaat**: Penerapan Sistem Elektronik yang aman di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Perjanjian Kerja Sama	Dinas Kominfo (19-11-2025)

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Tapin 2025

Sertifikat elektronik sendiri yaitu sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan identitas yang menunjukan status subjek hukum dalam

transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.

Tahun 2025 Perangkat Daerah yang telah menggunakan TTE sebanyak 54 Perangkat Daerah, artinya semua Perangkat Daerah sudah memanfaatkan TTE atau Capaian kinerja 100%.

Pada Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dinas Kominfo pada tahun ini juga melaksanakan kegiatan sosialisasi penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) kepada Perangkat Daerah, dimana sosialiasi pada tahun 2025 difokuskan pada simulasi penerapan TTE dalam dokumen resmi pemerintahan serta pengenalan sistem verifikasi tanda tangan digital,

Gambar 3.16 : Bimbingan Teknis TTE

Tabel 3.30
Kertas Kerja Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Poin	80,5 Poin	99,38%	**Keberhasilan** 1. Perbaikan penyusunan pohon kinerja, perbaikan IKU, dan PK 2. Penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal terhadap sasaran kinerja 3. Pemanfaatan aplikasi eSAKIP-NG untuk pengukuran dan evaluasi kinerja **Kegagalan** 1. Komitmen sebagian pegawai terhadap SAKIP masih belum tinggi 2. Sebagian pegawai belum memahami kinerjanya masing-masing sehingga sasaran kinerja dan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja kurang relevan dan belum menantang	1. Melaksanakan kegiatan terkait penyusunan dokumen perencanaan berbasis manajemen risiko 2. Melaksanakan rapat koordinasi perumusan dan penetapan perencanaan kinerja pada masing-masing individu 3. Melakukan pengukuran kinerja dan Evaluasi kinerja Internal (monev) melalui pemanfaatan aplikasi internal SiEmon Diskominfo dan pemanfaatan e-SAKIP New Generation
2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	80 Poin	81,59 Poin	101,99%	**Keberhasilan** 1. Secara umum IP-ASN Dinas Kominfo berhasil mencapai target melalui update data kompetensi	1. Mendorong ASN untuk mengikuti tugas belajar 2. Mendorong ASN untuk mengikuti Diklat teknis 3. Mendorong ASN mengikuti

						ASN pada aplikasi MyASN 2. Sebagian ASN mengikuti tugas belajar **Kegagalan** 1. Kurangnya minat ASN mengikuti tugas belajar. 2. ASN lebih banyak mengikuti peningkatan kompetensi yang bersifat klasikal seperti pelatihan, seminar, workshop, dan lain sebagainya dari pada diklat teknis	diklat teknis pendukung 4. Monitoring ASN melakukan update data peningkatan kompetensi
3	Meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapin	4,0 Poin	3,95 Poin	98,75%	**Keberhasilan** 1. Kepedulian pimpinan dan kompetensi teknis SDM yang dimiliki di bidang TI, 2. Pengembangan layanan digital yang berfokus pada peningkatan kualitas penerapan layanan digital, 3. Penerapan Arsitektur SPBE, layanan manajemen data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan	1. Melakukan pendampingan berkelanjutan kepada Perangkat Daerah terkait Implementasi SPBE 2. Melakukan review Arsitektur SPBE sesuai dengan prosedur yang berlaku 3. Mengoperasionalkan SPLP dalam Pengintegrasian aplikasi umum berbagi pakai pada bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, pemanfaatan layanan dan

						Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP), 4. Penanganan insiden keamanan informasi, 5. Penyelenggaraan Statistik Sektoral terintegrasi dalam eWALIDATA dan Satu Data. **Kegagalan** 1. Ego sektoral yang mengakibatkan banyaknya aplikasi mandiri di setiap Perangkat Daerah yang sulit diintegrasikan. 2. Ancaman keamanan siber yang semakin tinggi, infrastruktur dan kebijakan pengamanan data belum sepenuhnya merata pada perangkat daerah. 3. Penundaan permohonan fasilitasi Aplikasi dan Akun Cyberchat dari BSSN untuk pelaksaanan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) Pemerintah Daerah	kearsipan, Layanan Akuntabilitas kinerja 4. Sosialisasi dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SP4N LAPOR 5. Koordinasi perangkat daerah dalam pemanfaatan portal Satu Data dan eWALIDATA 6. Meningkatkan peran agen siber untuk pengamanan informasi melalui jaring komunikasi sandi, sosialisasi penggunaan internet sehat

Sumber : (Data Diolah) Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2025

3.2 Efisiensi Anggaran

Untuk mengukur efisiensi atas penggunaan sumber daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin menggunakan rumus berikut ini :

$$efisiensi = \frac{((pagu\ anggaran\ x\ capaian\ kinerja) - realisasi\ anggaran}{pagu\ anggaran\ x\ capaian\ kinerja} x100\%$$

Jika nilai persentase capaian anggaran lebih rendah dari capaian kinerja yang diperoleh, maka dapat dianggap bahwa anggaran tersebut efektif terhadap pencapaian kinerja. Dan jika nilai persentase efisiensi lebih tinggi dari persentase capaian anggaran, maka dapat dianggap bahwa anggaran tersebut efisien terhadap pencapaian kinerja.

Menentukan kategori nilai efisiensi dengan kriteria: nilai efisiensi lebih dari 90% pelaksanaan anggaran dikatakan sangat efisien; nilai efisiensi lebih dari 80% sampai 90% pelaksanaan anggaran dikatakan efisien; nilai efisiensi lebih dari 60% sampai 80% pelaksanaan anggaran dikatakan cukup efisien; nilai efisiensi lebih dari 50% sampai 60% pelaksanaan anggaran dikatakan kurang efisien dan nilai efisiensi dibawah 50% pelaksanaan anggaran dikatakan sangat kurang efisien.

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya terhadap pencapaian tujuan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.31
Perbandingan Pencapaian Kinerja Tujuan dan Anggaran

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			% Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	Meningkatnya Tata Kelola Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	81 Poin	80,50 Poin	99,38	5.644.338.599	4.893.259.926	86,69	99,13

2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT	85 Poin	94,37 Poin	111,04	5.911.470.926	5.764.659.514	97,51	99,12
Jumlah/rata-rata				**105,21**	**11.602.126.525**	**10.657.919.440**	**91,86**	**99,12**

Sumber : (Data Diolah) Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja tujuan "Meningkatnya Tata Kelola Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah" adalah sebesar 99,13% yang berarti bahwa dengan pagu anggaran Rp 5.644.338.599,- realisasi anggaran Rp 4.893.259.926,- dan capaian kinerja 99,38%, nilai efisiensi sebesar 99,13% dikategorikan pelaksanaan anggaran sangat efisien.
2. Nilai efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja tujuan "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT" adalah sebesar 99,12% yang berarti bahwa dengan pagu anggaran Rp 5.911.470.926,- realisasi anggaran Rp 5.764.659.514,- dan capaian kinerja 111,04%, nilai efisiensi sebesar 99,12% dikategorikan pelaksanaan anggaran sangat efisien.

Rata-rata nilai efisiensi dari kedua tujuan tersebut yaitu 99,12% yang berarti bahwa dengan pagu anggaran Rp 11.602.126.525,- realisasi anggaran Rp 10.657.919.440 dan capaian kinerja 105,21%, nilai efisiensi sebesar 99,12% dikategorikan pelaksanaan anggaran sangat efisien terhadap pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya.

Sedangkan efisiensi atas penggunaan sumber daya terhadap pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.32
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran dan Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			% Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	81 Poin	80,50 Poin	99,38	4.054.938.603	3.402.595.254	83,91	99,15
2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	80 Poin	81,59 Poin	101,99	1.589.399.996	1.490.664.672	93,78	99,08
3	Meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4 Poin	3,95 Poin	98,75	5.911.470.926	5.764.659.514	97,51	99,01
Jumlah/rata-rata				**100,04**	**11.602.126.525**	**10.657.919.440**	**91,86**	**99,08**

Sumber : (Data Diolah) Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa

1. Nilai efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” adalah sebesar 99,15% yang berarti bahwa dengan pagu anggaran Rp 4.054.938.603,- realisasi anggaran Rp 3.402.595.254,- dan capaian kinerja 99,38%, nilai efisiensi sebesar 99,15% dikategorikan pelaksanaan anggaran sangat efisien.
2. Nilai efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah” adalah sebesar 99,08% yang berarti bahwa dengan pagu anggaran Rp 1.589.399.996,- realisasi anggaran Rp 1.490.664.672,- dan capaian kinerja 101,99%, nilai efisiensi sebesar 99,08% dikategorikan pelaksanaan anggaran sangat efisien.

3. Nilai efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja sasaran "Meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)" adalah sebesar 99,01% yang berarti bahwa dengan pagu anggaran Rp 5.911.470.926,- realisasi anggaran Rp 5.764.659.514,- dan capaian kinerja 98,75%, nilai efisiensi sebesar 99,01% dikategorikan pelaksanaan anggaran sangat efisien.

Rata-rata nilai efisiensi dari ketiga tujuan tersebut yaitu 99,08% yang berarti bahwa dengan pagu anggaran Rp 11.602.126.525,- realisasi anggaran Rp 10.657.919.440 dan capaian kinerja 100,04%, nilai efisiensi sebesar 99,08% dikategorikan pelaksanaan anggaran sangat efisien terhadap pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan anggaran berdasarkan program/kegiatan/ dan sub kegiatan dalam berikut :

Tabel 3.33
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.644.338.599**	**4.893.259.926**	**86,69**	**13,31**
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**18.320.000**	**18.320.000**	**100,00**	**0,00**
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000	8.000.000	100,00	0,00
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.320.000	10.320.000	100,00	0,00
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.036.618.603**	**3.384.275.254**	**83,84**	**16,16**
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.030.618.603	3.378.275.254	83,82	16,18
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000	100,00	0,00
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	3.000.000	3.000.000	100,00	0,00

	Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				
1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**888.337.000**	**837.099.612**	**94,23**	**5,77**
1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.309.200	51.170.000	99,73	0,27
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	334.922.100	284.748.600	85,02	14,98
1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.430.400	60.176.500	99,58	0,42
1.3.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.732.500	25.722.000	99,96	0,04
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	415.942.800	415.282.512	99,84	0,16
1.4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**559.482.276**	**524.255.745**	**93,70**	**6,30**
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	258.091.176	229.517.445	88,93	11,07
1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	301.391.100	294.738.300	97,79	2,21
1.5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**141.580.720**	**129.309.315**	**91,33**	**8,67**
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.742.560	62.107.915	84,22	15,78
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.895.500	21.835.000	99,72	0,28
1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	45.942.660	45.366.400	98,75	1,25
2	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**2.284.463.900**	**2.248.275.000**	**98,42**	**1,58**
2.1	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Kabupaten/Kota**	**2.284.463.900**	**2.248.275.000**	**98,42**	**1,58**
2.1.1	Relasi Media	1.855.525.000	1.821.525.000	98,17	1,83
2.1.2	Kemitraaan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	7.755.000	7.755.000	100,00	0,00
2.1.3	Pelayanan Informasi Publik	110.124.700	110.070.000	99,95	0,05
2.1.4	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	33.678.200	33.310.000	98,91	1,09

2.1.5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	269.626.000	267.885.000	99,35	0,65
2.1.6	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	7.755.000	7.730.000	99,68	0,32
3	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**3.211.950.926**	**3.169.747.825**	**98,69**	**1,31**
3.1	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**1.280.944.776**	**1.274.310.884**	**99,48**	**0,52**
3.1.1	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	1.280.944.776	1.274.310.884	99,48	0,52
3.2	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**1.931.006.150**	**1.895.436.941**	**98,16**	**1,84**
3.2.1	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	384.284.400	384.100.000	99,95	0,05
3.2.2	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	173.950.690	166.495.300	95,71	4,29
3.2.3	Pembangunan dan/ atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rancangan SPBE Pemerintah Daerah	21.900.000	21.900.000	100,00	0,00
3.2.4	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	113.419.660	113.346.778	99,94	0,06
3.2.5	Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK Sesuai Kewenangan Dinas Kominfo	1.155.690.000	1.154.036.692	99,86	0,14
3.2.6	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	81.761.400	55.558.171	67,95	32,05
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**224.536.600**	**190.238.200**	**84,72**	**15,28**
4.1	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah**	**224.536.600**	**190.238.200**	**84,72**	**15,28**

	Kabupaten/Kota				
4.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	114.844.500	96.068.000	83,65	16,35
4.1.2	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	109.692.100	94.170.200	85,85	14,15
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**236.836.500**	**156.398.489**	**66,04**	**33,96**
5.1	**Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**190.519.500**	**152.758.489**	**80,18**	**19,82**
5.1.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	113.018.500	100.052.800	88,53	11,47
5.1.2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	77.501.000	52.705.689	68,01	31,99
5.2	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**46.317.000**	**3.640.000**	**7,86**	**92,14**
5.2.1	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	46.317.000	3.640.000	7,86	92,14
JUMLAH		**11.602.126.525**	**10.657.919.440**	**91,86**	**8,14**

Sumber : Monev Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, tingkat efisiensi dihitung dengan rumus (Anggaran - Realisasi) / Anggaran. Dengan dasar ini, efisiensi pada tabel sesungguhnya menunjukkan besarnya sisa anggaran yang belum terserap. Semakin kecil angka efisiensi, berarti serapan anggaran semakin tinggi.

Secara keseluruhan total anggaran yang ditetapkan pada tahun 2025 dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin yaitu sebesar Rp. 11.602.126.525,- yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 10.657.919.440,- atau 91,86% yang terealisasi dengan kategori

capaian Sangat Tinggi sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien sebesar Rp. 944.207.085,- dengan tingkat efisiensi anggaran 8,14%.

Secara naratif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pada umumnya telah berjalan baik, karena lebih dari 90% anggaran telah terserap. Meski demikian, tingkat efisiensi 8,14% juga menandakan bahwa masih ada ruang perbaikan dalam ketepatan perencanaan dan percepatan pelaksanaan kegiatan, terutama pada program-program yang realisasinya belum optimal. Dengan kata lain, dari sisi penyerapan anggaran, kinerja organisasi sudah cukup efektif, tetapi belum sepenuhnya maksimal.

Apabila dilihat per program, Program Aplikasi Informatika merupakan program dengan kinerja penyerapan terbaik. Program ini memiliki realisasi 98,69% dengan tingkat efisiensi 1,31%, sehingga dapat dikatakan bahwa antara rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan sudah cukup selaras. Kondisi ini menunjukkan bahwa program tersebut direncanakan dengan relatif tepat dan dilaksanakan secara konsisten sampai akhir tahun. Hal yang sama juga tampak pada Program Informasi dan Komunikasi Publik, yang mencatat realisasi 98,42% dengan efisiensi 1,58%. Capaian ini menunjukkan bahwa program tersebut tergolong baik dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia.

Di sisi lain, Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi menjadi program yang paling rendah tingkat penyerapannya. Realisasi program ini hanya 66,04% dengan efisiensi 33,96%. Angka tersebut menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga anggaran pada program ini belum terserap. Secara deskriptif, kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam program tersebut belum berjalan sepenuhnya sesuai rencana, baik karena volume kegiatan yang tidak terlaksana seluruhnya, keterlambatan proses pelaksanaan, maupun

kemungkinan adanya penyesuaian kebutuhan di lapangan. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral juga masih menunjukkan efisiensi yang relatif tinggi, yaitu 15,28%. Kedua program ini pada dasarnya sudah berjalan, namun serapannya masih belum optimal.

Jika ditinjau dari besaran anggaran, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki pengaruh paling besar terhadap capaian efisiensi total karena pagunya mencapai Rp 5.644.338.599,- dengan realisasi Rp 4.893.259.926,- atau 86,69%, sehingga efisiensinya 13,31%. Karena porsinya paling besar dibanding program lain, setiap sisa anggaran pada program ini sangat mempengaruhi tingkat efisiensi keseluruhan perangkat daerah. Dengan demikian, walaupun beberapa program lain penyerapannya sangat baik, capaian total tetap banyak ditentukan oleh keberhasilan penyerapan pada program penunjang.

Pada level kegiatan, di dalam Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota hanya terealisasi 7,86%, dengan tingkat efisiensinya mencapai 92,14% yang berarti sebagian besar anggarannya belum terserap. Sebaliknya, beberapa kegiatan menunjukkan penyerapan sangat tinggi, seperti Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi 99,48% dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Kabupaten/Kota sebesar 99,42%.

Gambaran ini menunjukkan bahwa masalah efisiensi tidak merata di seluruh kegiatan; ada program yang sudah sangat optimal, tetapi ada pula kegiatan yang masih memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

Adapun efisiensi penggunaan anggaran berdasarkan program/kegiatan/ dan sub kegiatan diatas bersumber dari :

a. Terdapat Sisa Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 652.343.349 karena adanya pegawai yang pensiun/mutasi, formasi jabatan yang belum terisi, serta realisasi pembayaran tunjangan yang lebih rendah dari perkiraan pada saat penyusunan anggaran.
b. Terdapat sisa anggaran pada kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 50.173.500,- karena kebutuhan riil makan minum harian pegawai lebih rendah dimana saat bulan Ramadhan makan minum harian pegawai ditiadakan, adanya efisiensi penggunaan bahan logistik, serta harga pembelian bahan kebersihan yang lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan pada saat penyusunan anggaran.
c. Terdapat sisa anggaran pada belanja tagihan listrik, telepon, dan air sebesar Rp.28.573.731,- karena realisasi pemakaian/penggunaan lebih rendah dari yang diperkirakan serta adanya efisiensi penggunaan sarana dan prasarana perkantoran.
d. Terdapat sisa anggaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 11.634.645,- terjadi karena efisiensi biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan realisasi kebutuhan pemeliharaan serta pembayaran pajak kendaraan yang lebih rendah dari perencanaan.
e. Terdapat sisa anggaran pada kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas sebesar Rp. 26.203.229,- karena adanya efisiensi /sisa anggaran Internet/Wifi Publik Rantau Baru yang diisolir, serta penyesuaian dan optimalisasi pelaksanaan program sesuai kebutuhan riil.
f. Terdapat sisa anggaran pada kegiatan Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Statistik Sektoral sebesar Rp. 18.776.500,- karena adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan Koordinasi persiapan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dimana realisasi kebutuhan kegiatan yang lebih rendah dibandingkan dengan perencanaan anggaran.

g. Terdapat sisa anggaran pada kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 15.521.900,- karena adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan Forum Satu Data Indonesia (SDI), dimana realisasi kebutuhan kegiatan yang lebih rendah dibandingkan dengan perencanaan anggaran.
h. Terdapat sisa anggaran pada kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik sebesar Rp. 12.965.700,- karena adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan Bimtek Agen Siber, dengan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia.
i. Terdapat sisa anggaran pada kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 24.795.311,- karena adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan sosialisasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) dengan realisasi kebutuhan anggaran yang lebih rendah dibandingkan dengan perencanaan anggaran. Namun juga terdapat anggaran yang tidak terserap yaitu jasa pembuatan video MoU perpanjangan TTE dengan BSSN yang pelaksanaan nya dilaksanakan secara Daring saja.
j. Terdapat sisa anggaran pada kegiatan Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 42.677.000,- karena tidak terlaksananya kegiatan Sosialisasi Jaring Komunikasi Sandi Nasional (JKSN) Pemerintah Daerah melalui penggunaan Aplikasi Cyberchat oleh BSSN belum dapat dilaksanakan sebagaimana surat

pemberitahuan penundaan permohonan fasilitasi Aplikasi dan Akun Cyberchat dari BSSN.

Secara keseluruhan bahwa pengelolaan anggaran telah berada pada kategori baik, namun belum sepenuhnya merata antar program dan antar kegiatan. Oleh karena itu, secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa tantangan utama bukan lagi pada pelaksanaan seluruh program secara umum, melainkan pada pemerataan kualitas penyerapan anggaran, terutama pada kegiatan-kegiatan yang realisasinya masih jauh dibawah target pagu yang telah ditetapkan.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator sasaran strategis tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin yang perlu diantisipasi adalah Ego sektoral yang mengakibatkan banyaknya aplikasi mandiri di setiap Perangkat Daerah yang sulit diintegrasikan, ancaman keamanan siber yang semakin tinggi, infrastruktur dan kebijakan pengamanan data belum sepenuhnya merata pada perangkat daerah.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan layanan digital berfokus pada peningkatan kualitas penerapan layanan digital pemerintah daerah untuk akselerasi transformasi digital menuju Pemerintahan Digital sehingga sangat memerlukan dukungan dari seluruh perangkat daerah dengan menyatukan persepsi bahwa pentingnya digitalisasi pemerintahan agar pelayanan publik dapat dilakukan secara cepat dan efisien, sehingga memberikan kepuasan terhadap publik.
2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT.
3) Meningkatkan pengamanan informasi melalui jaring komunikasi sandi, sosialisasi penggunaan internet sehat dan pengawasan serta pengendalian komunikasi dan informatika.
4) Meningkatkan koordinasi perangkat daerah dalam pemanfaatan portal Satu Data.
5) Meningkatkan sosialisasi, pembinaan, serta pelatihan bidang teknologi informasi baik di lingkup internal maupun masyarakat.
6) Mengupayakan peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan, dan memberdayakan Masyarakat
7) Meningkatkan komitmen bersama pada semua tingkatan dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi nya masing-masing.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun

pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Rantau, 14 April 2026
Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tapin

Wahyudi Pranoto, S.Sos, MT
NIP. 19710130 199903 1 005

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja
Kepala Perangkat Daerah
Tahun 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyudi Pranoto, S.Sos, MT

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Yamani, S.Ak, MM

Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
BUPATI TAPIN	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN
H. Yamani, S.Ak, MM	**Wahyudi Pranoto, S.Sos, MT** **NIP. 19710130 199903 1 005**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Poin
2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	80 Poin
3	Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapin	4 Poin

No.	Program		Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	5.538.928.699
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.	1.850.202.500
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.	3.378.850.926
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp.	564.799.700
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp.	364.799.700

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,

BUPATI TAPIN

H. Yamani, S.Ak, MM

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TAPIN

Wahyudi Pranoto, S.Sos, MT
NIP. 19710130 199903 1 005

Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyudi Pranoto, S.Sos, MT

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Yamani, S.Ak, MM

Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 06 Oktober 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
BUPATI TAPIN	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN
H. Yamani, S.Ak, MM	**Wahyudi Pranoto, S.Sos, MT** NIP. 19710130 199903 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatnya Tata Kelola Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	81 Poin
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT	Indeks Kepuasan Masyarakat (Diskominfo)	85 Poin
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Poin
4	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	80 Poin
5	Meningkatnya indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) kabupaten tapin	4 Poin

No.	Program		Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	5.538.928.699
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.	1.850.202.500
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.	3.378.850.926
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp.	564.799.700
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp.	364.799.700

Rantau, 06 Oktober 2025

Pihak Kedua,

BUPATI TAPIN

H. Yamani, S.Ak, MM

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TAPIN

Wahyudi Pranoto, S.Sos, MT
NIP. 19710130 199903 1 005

Matriks Renstra 2025-2029

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Strategis	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Sasaran Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*), Kegiatan (*output*), dan Sub Kegiatan	Baseline Tahun 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*4*	*8*	*9*	*10*	*11*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
								Rp 11.906.842.898		Rp 12.553.170.598		Rp 13.105.341.200		Rp 13.683.680.220		Rp 14.289.516.502		Rp 61.866.641.565		
TUJUAN 1																				
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH				NILAI SAKIP	79,05 Poin	81 Poin	82 Poin	Rp 5.673.190.072	83 Poin	Rp 5.703.652.489	84 Poin	Rp 5.988.351.466	85 Poin	Rp 6.156.710.300	86 Poin	Rp 6.762.546.582	86 Poin	Rp 30.284.450.909	Diskominfo	Kab.Tapin
	SASARAN 1																			
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH			NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	79,05 Poin	81 Poin	82 Poin	Rp 4.024.320.000	83 Poin	Rp 4.026.752.000	84 Poin	Rp 4.029.427.200	85 Poin	Rp 4.029.427.200	86 Poin	Rp 4.029.427.200	86 Poin	Rp 20.139.353.600	Diskominfo	Kab.Tapin
			PROGRAM																	
		Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	02.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	24,60	25,60	26,10	Rp 4.024.320.000	26,10	Rp 4.026.752.000	26,10	Rp 4.029.427.200	26,10	Rp 4.029.427.200	26,10	Rp 4.029.427.200	26,10	Rp 20.139.353.600	Diskominfo	Kab.Tapin
				Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	26,10	26,05	26,55		26,55		26,55		26,55		26,55		26,55		Diskominfo	Kab.Tapin
				Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	11,85	12,85	12,35		12,85		13,35		13,85		13,85		13,85		Diskominfo	Kab.Tapin
				Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	16,50	16,50	17,00		17,50		18,00		18,50		19,00		19,000		Diskominfo	Kab.Tapin
		Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Diskominfo	Kab.Tapin
			KEGIATAN																	
		Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100%	100%	100%	Rp 18.320.000	100%	Rp 20.152.000	100%	Rp 22.167.200	100%	Rp 22.167.200	100%	Rp 22.167.200	100%	Rp 104.973.600	Diskominfo	Kab.Tapin
		Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah		Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	90%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklajuti	95%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			SUB KEGIATAN																	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Rp 8.000.000	7 Dokumen	Rp 8.800.000	8 Dokumen	Rp 9.680.000	9 Dokumen	Rp 9.680.000	10 Dokumen	Rp 9.680.000	10 Dokumen	Rp 45.840.000	Diskominfo	Kab.Tapin
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Rp 10.320.000	5 Laporan	Rp 11.352.000	6 Laporan	Rp 12.487.200	7 laporan	Rp 12.487.200	8 laporan	Rp 12.487.200	8 laporan	Rp 59.133.600	Diskominfo	Kab.Tapin

Tujuan	Sasaran Strategis	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Sasaran Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*), Kegiatan (*output*), dan Sub Kegiatan	Baseline Tahun 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*4*	*8*	*9*	*10*	*11*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
			KEGIATAN																	
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungajawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%	100%	100%	Rp 4.006.000.000	100%	Rp 4.006.600.000	100%	Rp 4.007.260.000	100%	Rp 4.007.260.000	100%	Rp 4.007.260.000	100%	Rp 20.034.380.000	Diskominfo	Kab.Tapin
				Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			SUB KEGIATAN																	
		Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288 Orang/Bulan	288 Orang/Bulan	360 Orang/Bulan	Rp 4.000.000.000	360 Orang/Bulan	Rp 4.000.000.000	360 Orang/Bulan	Rp 4.000.000.000	360 Orang/Bulan	Rp 4.000.000.000	360 Orang/Bulan	Rp 4.000.000.000	360 Orang/Bulan	Rp 20.000.000.000	Diskominfo	Kab.Tapin
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp 3.000.000	2 Laporan	Rp 3.300.000	2 Laporan	Rp 3.630.000	2 Laporan	Rp 3.630.000	2 Laporan	Rp 3.630.000	2 Laporan	Rp 17.190.000	Diskominfo	Kab.Tapin
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 3.000.000	1 Laporan	Rp 3.300.000	1 Laporan	Rp 3.630.000	1 Laporan	Rp 3.630.000	1 Laporan	Rp 3.630.000	1 Laporan	Rp 17.190.000	Diskominfo	Kab.Tapin
	SASARAN 2																			
	MENINGKATNYA PROFESIONALISME ASN PERANGKAT DAERAH			INDEKS PROFESIONALISME ASN (IP-ASN) PERANGKAT DAERAH	77,3 Poin	80 Poin	81 Poin	Rp 1.648.870.072	82 Poin	Rp 1.676.900.489	83 Poin	Rp 1.958.924.266	84 Poin	Rp 2.127.283.100	85 Poin	Rp 2.733.119.382	85 Poin	Rp 10.145.097.309	Diskominfo	Kab.Tapin
			PROGRAM																	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	02.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100%	100%	100%	Rp 1.648.870.072	100%	Rp 1.676.900.489	100%	Rp 1.958.924.266	100%	Rp 2.127.283.100	100%	Rp 2.733.119.382	100%	Rp 10.145.097.309	Diskominfo	Kab.Tapin
		Meningkatnya Pelayanan Sekretariat		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Diskominfo	Kab.Tapin
			KEGIATAN																	
		Meningkatnya ASN yang berkualitas	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	41%	87%	90%	Rp 989.104.916	93%	Rp 956.158.817	97%	Rp 1.171.108.428	100%	Rp 1.339.467.262	100%	Rp 1.945.303.544	100%	Rp 6.401.142.967	Diskominfo	Kab.Tapin
			SUB KEGIATAN																	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 35.271.100	12 Paket	Rp 38.798.210	12 Paket	Rp 42.678.031	12 Paket	Rp 42.678.031	12 Paket	Rp 42.678.031	12 Paket	Rp 202.103.403	Diskominfo	Kab.Tapin

Tujuan	Sasaran Strategis	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Sasaran Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*), Kegiatan (*output*), dan Sub Kegiatan	Baseline Tahun 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*4*	*8*	*9*	*10*	*11*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
		Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 322.875.800	12 Paket	Rp 355.163.380	12 Paket	Rp 390.679.718	12 Paket	Rp 390.679.718	12 Paket	Rp 390.679.718	12 Paket	Rp 1.850.078.334	Diskominfo	Kab.Tapin
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 56.404.000	12 Paket	Rp 62.044.400	12 Paket	Rp 68.248.840	12 Paket	Rp 68.248.840	12 Paket	Rp 68.248.840	12 Paket	Rp 323.194.920	Diskominfo	Kab.Tapin
		Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.16.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 15.250.000	12 Laporan	Rp 16.775.000	12 Laporan	Rp 18.452.500	12 Laporan	Rp 18.452.500	12 Laporan	Rp 18.452.500	12 Laporan	Rp 87.382.500	Diskominfo	Kab.Tapin
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 559.304.016	12 Laporan	Rp 483.377.827	12 Laporan	Rp 651.049.339	12 Laporan	Rp 819.408.173	12 Laporan	Rp 1.425.244.455	12 Laporan	Rp 3.938.383.810	Diskominfo	Kab.Tapin
			KEGIATAN																	
		Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	**2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik**	**100%**	**94%**	**95%**	**Rp 50.000.000**	**96%**	**Rp 50.000.000**	**97%**	**Rp 50.000.000**	**98%**	**Rp 50.000.000**	**98%**	**Rp 50.000.000**	**98%**	**Rp 250.000.000**	**Diskominfo**	**Kab.Tapin**
			SUB KEGIATAN																	
		Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	70 Unit	-	32 Unit	Rp 50.000.000	32 Unit	Rp 50.000.000	32 Unit	Rp 50.000.000	32 Unit	Rp 50.000.000	32 Unit	Rp 50.000.000	32 Unit	Rp 250.000.000	Diskominfo	Kab.Tapin
			KEGIATAN																	
		Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	**2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan Baik**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 500.209.216**	**100%**	**Rp 550.230.138**	**100%**	**Rp 605.253.151**	**100%**	**Rp 605.253.151**	**100%**	**Rp 605.253.151**	**100%**	**Rp 2.866.198.807**	**Diskominfo**	**Kab.Tapin**
			SUB KEGIATAN																	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	11 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 250.009.176	12 Laporan	Rp 275.010.094	12 Laporan	Rp 302.511.103	12 Laporan	Rp 302.511.103	12 Laporan	Rp 302.511.103	12 Laporan	Rp 1.432.552.579	Diskominfo	Kab.Tapin
		Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 250.200.040	12 Laporan	Rp 275.220.044	12 Laporan	Rp 302.742.048	12 Laporan	Rp 302.742.048	12 Laporan	Rp 302.742.048	12 Laporan	Rp 1.433.646.228	Diskominfo	Kab.Tapin
			KEGIATAN																	
		Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	**2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik**	**100%**	**94%**	**95%**	**Rp 109.555.940**	**96%**	**Rp 120.511.534**	**97%**	**Rp 132.562.687**	**98%**	**Rp 132.562.687**	**98%**	**Rp 132.562.687**	**98%**	**Rp 627.755.535**	**Diskominfo**	**Kab.Tapin**

Tujuan	Sasaran Strategis	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Sasaran Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*), Kegiatan (*output*), dan Sub Kegiatan	Baseline Tahun 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*4*	*8*	*9*	*10*	*11*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
			SUB KEGIATAN																	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	3 Unit	Rp 52.781.560	3 Unit	Rp 58.059.716	3 Unit	Rp 63.865.687	3 Unit	Rp 63.865.687	3 Unit	Rp 63.865.687	3 Unit	Rp 302.438.337	Diskominfo	Kab.Tapin
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Rp 17.916.400	2 Unit	Rp 19.708.040	2 Unit	Rp 21.678.844	2 Unit	Rp 21.678.844	2 Unit	Rp 21.678.844	2 Unit	Rp 102.660.972	Diskominfo	Kab.Tapin
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	Rp 38.857.980	3 Unit	Rp 42.743.778	3 Unit	Rp 47.018.156	3 Unit	Rp 47.018.156	3 Unit	Rp 47.018.156	3 Unit	Rp 222.656.226	Diskominfo	Kab.Tapin
TUJUAN 2																				
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS IT				INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (DISKOMINFO)	-	-	86%	Rp 6.233.652.826	87%	Rp 6.849.518.109	88%	Rp 7.116.989.734	89%	Rp 7.526.969.920	90%	Rp 7.526.969.920	90%	Rp 31.582.190.656	Diskominfo	Kab.Tapin
	SASARAN 3																			
	MENINGKATNYA INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)			INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)	3,81 Poin	4,0 Poin	4,1 Poin	Rp 6.233.652.826	4,2 Poin	Rp 6.849.518.109	4,3 Poin	Rp 7.116.989.734	4,4 Poin	Rp 7.526.969.920	4,5 Poin	Rp 7.526.969.920	4,5 Poin	Rp 31.582.190.656	Diskominfo	Kab.Tapin
			PROGRAM																	
		Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	02.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	N/A	92%	94%	Rp 1.850.202.500	96%	Rp 2.035.222.750	98%	Rp 2.238.745.025	100%	Rp 2.238.745.025	100%	Rp 2.238.745.025	100%	Rp 10.601.660.325		
		Terpenuhinya jasa publikasi berita daerah		Persentase peningkatan jasa publikasi daerah	80%	80%	85%		90%		95%		100%		100%		100%			
		Meningkatnya ketersediaan data informasi publik melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)		Persentase ketersediaan data informasi publik yang di sediakan	90%	96%	97%		98%		99%		100%		100%		100%			
		Meningkatnya aduan masyarakat melalui aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)		Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor)	51%	92%	94%		96%		98%		100%		100%		100%			

Tujuan	Sasaran Strategis	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Sasaran Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*), Kegiatan (*output*), dan Sub Kegiatan	Baseline Tahun 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*4*	*8*	*9*	*10*	*11*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
			KEGIATAN																	
		Terlaksananya Pembinaan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang telah dibentuk	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang di bina	75%	56%	64%		72%		80%		88%		96%		96%		Diskominfo	Kab.Tapin
		Optimalisasi kerja sama dengan media elektronik Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)		Persentase jumlah jam tayang	105%	92%	94%	Rp 1.850.202.500	96%	Rp 2.035.222.750	98%	Rp 2.238.745.025	100%	Rp 2.238.745.025	100%	Rp 2.238.745.025	100%	Rp 10.601.660.325	Diskominfo	Kab.Tapin
		Meningkatnya kapasitas admin PPID		Persentase admin PPID yang ditingkatkan kapasitasnya	76%	88%	91%		94%		97%		100%		100%		100%		Diskominfo	Kab.Tapin
		Terlaksananya Monev aplikasi SP4N Lapor		Persentase Pejabat Penghubung yang mendapatkan Monev Aplikasi SP4N Lapor	N/A	91%	93%		96%		98%		100%		100%		100%		Diskominfo	Kab.Tapin
			SUB KEGIATAN																	
		Terlaksananya Relasi Media	2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	N/A	5 Laporan	5 laporan	Rp 1.466.537.500	5 laporan	Rp 1.613.191.250	6 laporan	Rp 1.774.510.375	7 laporan	Rp 1.774.510.375	8 laporan	Rp 1.774.510.375	8 laporan	Rp 8.403.259.875	Diskominfo	Kab.Tapin
				Jumlah aktivitas relasi media yang terdaftar di Dinas Kominfo	N/A	5 Laporan	5 laporan		5 laporan		6 laporan		7 laporan		8 laporan		8 laporan		Diskominfo	Kab.Tapin
		Terlaksananya Kemitraaan dengan Pemangku Kepentingan	2.16.02.2.01.0015 - Kemitraaan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	N/A	1 Komunitas	1 Komunitas	Rp 5.425.000	2 Komunitas	Rp 5.967.500	3 Komunitas	Rp 6.564.250	4 Komunitas	Rp 6.564.250	5 Komunitas	Rp 6.564.250	5 Komunitas	Rp 31.085.250	Diskominfo	Kab.Tapin
				Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang aktif di Dinas Kominfo	N/A	1 Komunitas	1 Komunitas		2 Komunitas		3 Komunitas		4 Komunitas		5 Komunitas		5 Komunitas		Diskominfo	Kab.Tapin
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	N/A	3 Permohonan	3 Permohonan	Rp 58.130.800	4 Permohonan	Rp 63.943.880	5 Permohonan	Rp 70.338.268	6 Permohonan	Rp 70.338.268	7 Permohonan	Rp 70.338.268	7 Permohonan	Rp 333.089.484	Diskominfo	Kab.Tapin
				Jumlah permohonan Informasi Publik yang diminta	N/A	3 Permohonan	3 Permohonan		4 Permohonan		5 Permohonan		6 Permohonan		7 Permohonan		7 Permohonan		Diskominfo	Kab.Tapin

Tujuan	Sasaran Strategis	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Sasaran Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*), Kegiatan (*output*), dan Sub Kegiatan	Baseline Tahun 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*4*	*8*	*9*	*10*	*11*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
		Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	N/A	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	Rp 37.308.200	5 Rekomendasi	Rp 41.039.020	6 Rekomendasi	Rp 45.142.922	7 Rekomendasi	Rp 45.142.922	8 Rekomendasi	Rp 45.142.922	8 Rekomendasi	Rp 213.775.986	Diskominfo	Kab.Tapin
				Jumlah Aduan masyarakat yang diterima melalui Aplikasi SP4N LAPOR	36 Aduan	40 Aduan	50 Aduan		55 Aduan		60 Aduan		65 Aduan		70 Aduan		70 Aduan		Diskominfo	Kab.Tapin
		Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/ juknis	N/A	4 Media	4 Media	Rp 275.626.000	5 Media	Rp 303.188.600	6 Media	Rp 333.507.460	7 Media	Rp 333.507.460	8 Media	Rp 333.507.460	8 Media	Rp 1.579.336.980	Diskominfo	Kab.Tapin
				Jumlah Media yang dikelola oleh Dinas Kominfo	N/A	4 Media	4 Media		5 Media		6 Media		7 Media		8 Media		8 Media		Diskominfo	Kab.Tapin
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/ pelatihan	N/A	4 Orang	4 Orang	Rp 7.175.000	7 Orang	Rp 7.892.500	7 Orang	Rp 8.681.750	7 Orang	Rp 8.681.750	7 Orang	Rp 8.681.750	7 Orang	Rp 41.112.750	Diskominfo	Kab.Tapin
				Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang mengikuti bimtek/ pelatihan	N/A	4 Orang	4 Orang		7 Orang		7 Orang		7 Orang		7 Orang		7 Orang		Diskominfo	Kab.Tapin
			PROGRAM																	
		Meningkatnya Implementasi Arsitektur SPBE	02.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE	-	-	1,7 Poin	Rp 3.403.850.926	1,8 Poin	Rp 3.741.736.019	1,9 Poin	Rp 3.703.429.435	2,0 Poin	Rp 4.113.409.621	2,1 Poin	Rp 4.113.409.621	2,1 Poin	Rp 15.403.925.769	Diskominfo	Kab.Tapin
		Meningkatnya jaringan intra antar perangkat daerah yang dikelola oleh diskominfo		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan intra yang dikelola oleh Diskominfo	35%	78%	82%		87%		91%		96%		100%		100%		Diskominfo	Kab.Tapin
		Melakukan integrasi pada seluruh aplikasi layanan administrasi perangkat daerah		Persentase aplikasi yang sudah terintegrasi	87%	80%	85%		90%		95%		100%		100%		100%		Diskominfo	Kab.Tapin
			KEGIATAN																	
		Terintegrasinya pelayanan publik secara online antar perangkat daerah	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemereintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	87%	71%	79%	Rp 1.318.444.776	86%	Rp 1.450.289.254	93%	Rp 1.395.318.179	100%	Rp 1.595.318.179	100%	Rp 1.595.318.179	100%	Rp 7.354.688.567	Diskominfo	Kab.Tapin

Tujuan	Sasaran Strategis	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Sasaran Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*), Kegiatan (*output*), dan Sub Kegiatan	Baseline Tahun 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*4*	*8*	*9*	*10*	*11*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
			SUB KEGIATAN																	
		Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain	N/A	4 Dokumen	6 Dokumen	Rp 1.318.444.776	6 Dokumen	Rp 1.450.289.254	6 Dokumen	Rp 1.395.318.179	5 Dokumen	Rp 1.595.318.179	5 Dokumen	Rp 1.595.318.179	5 Dokumen	Rp 7.354.688.567	Diskominfo	Kab.Tapin
				Jumlah pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	10 Layanan	10 Layanan	11 Layanan		12 Layanan		13 Layanan		14 Layanan		14 Layanan				Diskominfo	Kab.Tapin
			KEGIATAN																	
		Pembangunan sarana telekomunikasi untuk wilayah low spot (sinyal lemah)	**2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase desa / kelurahan bebas low spot (sinyal lemah)**	**66%**	**57%**	**58%**	**Rp 2.085.406.150**	**59%**	**Rp 2.291.446.765**	**60%**	**Rp 2.308.111.256**	**61%**	**Rp 2.518.091.442**	**62%**	**Rp 2.518.091.442**	**62%**	**Rp 8.049.237.202**	**Diskominfo**	**Kab.Tapin**
		Meningkatnya kualitas akses internet untuk perangkat daerah		**Persentase kualitas akses internet dengan kecepatan rata-rata 50 Mbps**	**74%**	**72%**	**75%**		**79%**		**83%**		**87%**		**91%**		**91%**		**Diskominfo**	**Kab.Tapin**
		Tercukupinya WiFi publik yang disediakan untuk masyarakat		**Persentase wifi publik yang disediakan untuk masyarakat**	**33%**	**43%**	**57%**		**71%**		**86%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Diskominfo**	**Kab.Tapin**
		Tersedianya server yang sesuai standar		**Persentase server sesuai standar**	**64%**	**71%**	**71%**		**86%**		**86%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Diskominfo**	**Kab.Tapin**
			SUB KEGIATAN																	
		Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di	N/A	-	2 Aplikasi	Rp 25.000.000	2 Aplikasi	Rp 25.000.000	2 Aplikasi	Rp 25.000.000	2 Aplikasi	Rp 25.000.000	3 Aplikasi	Rp 25.000.000	3 Aplikasi	Rp 125.000.000	Diskominfo	Kab.Tapin
				Jumlah Aplikasi Pemerintah Daerah yang ditempatkan di Pusat Data Nasional	N/A	-	2 Aplikasi		2 Aplikasi		2 Aplikasi		2 Aplikasi		3 Aplikasi		3 Aplikasi		Diskominfo	Kab.Tapin
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	N/A	8 Dokumen	8 Dokumen	Rp 221.950.690	9 Dokumen	Rp 244.145.759	10 Dokumen	Rp 268.560.335	11 Dokumen	Rp 268.560.335	12 Dokumen	Rp 268.560.335	12 Dokumen	Rp 1.271.777.454	Diskominfo	Kab.Tapin
				Jumlah Dokumen Evaluasi pelaksanaan Manajemen SPBE	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		Diskominfo	Kab.Tapin
		Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra	2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	N/A	21 Perangkat Daerah	21 Perangkat Daerah	Rp 125.419.660	22 Perangkat Daerah	Rp 137.961.626	23 Perangkat Daerah	Rp 151.757.789	24 Perangkat Daerah	Rp 151.757.789	25 Perangkat Daerah	Rp 151.757.789	25 Perangkat Daerah	Rp 718.654.653	Diskominfo	Kab.Tapin

Tujuan	Sasaran Strategis	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Sasaran Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*), Kegiatan (*output*), dan Sub Kegiatan	Baseline Tahun 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*4*	*8*	*9*	*10*	*11*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
		Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	N/A	21 Perangkat Daerah	21 Perangkat Daerah	Rp 125.419.660	22 Perangkat Daerah	Rp 137.961.626	23 Perangkat Daerah	Rp 151.757.789	24 Perangkat Daerah	Rp 151.757.789	25 Perangkat Daerah	Rp 151.757.789	25 Perangkat Daerah	Rp 718.654.653	Diskominfo	Kab.Tapin
				Jumlah perangkat daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra yang disediakan oleh Dinas Kominfo	N/A	21 Perangkat Daerah	21 Perangkat Daerah		22 Perangkat Daerah		23 Perangkat Daerah		24 Perangkat Daerah		25 Perangkat Daerah		25 Perangkat Daerah		Diskominfo	Kab.Tapin
		Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	2.16.03.2.02.0026 - Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK Sesuai Kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	N/A	2 Dokumen	4 Dokumen	Rp 1.170.090.000	4 Dokumen	Rp 1.287.099.000	4 Dokumen	Rp 1.205.828.714	3 Dokumen	Rp 1.415.808.900	3 Dokumen	Rp 1.415.808.900	3 Dokumen	Rp 6.494.635.514	Diskominfo	Kab.Tapin
				Jumlah Dokumen Fasilitasi Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	N/A	2 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		Diskominfo	Kab.Tapin
		Terlaksananya Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	N/A	N/A	1 Aplikasi	Rp 21.900.000	2 Aplikasi	Rp 24.090.000	3 Aplikasi	Rp 26.499.000	4 Aplikasi	Rp 26.499.000	5 Aplikasi	Rp 26.499.000	5 Aplikasi	Rp 125.487.000	Diskominfo	Kab.Tapin
				Jumlah aplikasi yang dibangun atau dikembangkan oleh Dinas Kominfo	N/A	N/A	1 Aplikasi		2 Aplikasi		3 Aplikasi		4 Aplikasi		5 Aplikasi		5 Aplikasi		Diskominfo	Kab.Tapin
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	N/A	12 Laporan	12 Laporan	Rp 439.284.400	13 Laporan	Rp 483.212.840	14 Laporan	Rp 531.534.124	15 Laporan	Rp 531.534.124	16 Laporan	Rp 531.534.124	16 Laporan	Rp 2.517.099.612	Diskominfo	Kab.Tapin
				Jumlah laporan pelaksanaan manajemen SPBE	N/A	12 Laporan	12 Laporan		13 Laporan		14 Laporan		15 Laporan		16 Laporan		16 Laporan		Diskominfo	Kab.Tapin

Tujuan	Sasaran Strategis	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Sasaran Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*), Kegiatan (*output*), dan Sub Kegiatan	Baseline Tahun 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*4*	*8*	*9*	*10*	*11*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	N/A	N/A	3 Dokumen	Rp 81.761.400	4 Dokumen	Rp 89.937.540	5 Dokumen	Rp 98.931.294	6 Dokumen	Rp 98.931.294	7 Dokumen	Rp 98.931.294	7 Dokumen	Rp 468.492.822	Diskominfo	Kab.Tapin
				Jumlah Wifi Publik yang dikelola Dinas Kominfo	3 Unit	3 Unit	3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		Diskominfo	Kab.Tapin
			PROGRAM																	
		Tercapaianya Kolaborasi, Integrasi dan Standarisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	**02.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAN STATISTIK SEKTORAL**	**Indeks Pembangunan Statistik (IPS)**	**2,63**	**2,63**	**2,65**		**2,65**		**2,70**		**2,70**		**2,75**		**2,75**		**Diskominfo**	**Kab.Tapin**
		Memastikan Pengintegrasian Data Statistik Sektoral Menuju Satu Data Indonesia		**Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas**	**90%**	**52%**	**54%**	**Rp 614.799.700**	**56%**	**Rp 671.279.670**	**58%**	**Rp 733.407.637**	**60%**	**Rp 733.407.637**	**62%**	**Rp 733.407.637**	**62%**	**Rp 3.486.302.281**	**Diskominfo**	**Kab.Tapin**
		Tersedianya data statistik sektoral tepat waktu		**Persentase data Statistik Sektoral yang disediakan tepat waktu**	**90%**	**52%**	**54%**		**56%**		**58%**		**60%**		**62%**		**62%**		**Diskominfo**	**Kab.Tapin**
			KEGIATAN																	
		Meningkatnya Perangkat Daerah yang mengikuti Bimtek/Desk Statistik Sektoral	**2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perangkat Daerah yang telah mendapat Bimtek/Desk Statistik Sektoral**	**N/A**	**64%**	**73%**	**Rp 614.799.700**	**82%**	**Rp 671.279.670**	**91%**	**Rp 733.407.637**	**100%**	**Rp 733.407.637**	**100%**	**Rp 733.407.637**	**100%**	**Rp 3.486.302.281**	**Diskominfo**	**Kab.Tapin**
		Meningkatnya kerja sama dalam pengumpulan Data Sektoral dari Perangkat Daerah		**Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan Data Sektoral**	**85%**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Diskominfo**	**Kab.Tapin**
		Terlaksananya Monev Statistik Sektoral Perangkat Daerah		**Persentase Perangkat Daerah yang di Monev Statistik Sektoral**	**N/A**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Diskominfo**	**Kab.Tapin**
			SUB KEGIATAN																	
		Terpenuhinya Prinsip Satu Data Indonesia	2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi	N/A	-	54%	Rp 25.000.000	56%	Rp 25.000.000	58%	Rp 25.000.000	60%	Rp 25.000.000	62%	Rp 25.000.000	62%	Rp 125.000.000	Diskominfo	Kab.Tapin
				Jumlah Laporan Kegiatan Satu Data	N/A	-	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		Diskominfo	Kab.Tapin
		Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	N/A	-	100%	Rp 25.000.000	100%	Rp 25.000.000	100%	Rp 25.000.000	100%	Rp 25.000.000	100%	Rp 25.000.000	100%	Rp 125.000.000	Diskominfo	Kab.Tapin

Tujuan	Sasaran Strategis	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Sasaran Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*), Kegiatan (*output*), dan Sub Kegiatan	Baseline Tahun 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*4*	*8*	*9*	*10*	*11*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
		Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	N/A	-	100%	Rp 25.000.000	100%	Rp 25.000.000	100%	Rp 25.000.000	100%	Rp 25.000.000	100%	Rp 25.000.000	100%	Rp 125.000.000	Diskominfo	Kab.Tapin
				Jumlah keterisian Data Statistik Sektoral yang berkualitas	N/A	-	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		Diskominfo	Kab.Tapin
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	2.20.02.2.01.0020 - Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	75 Orang	100 Orang	100 Orang	Rp 338.826.600	100 Orang	Rp 372.709.260	100 Orang	Rp 409.980.186	100 Orang	Rp 409.980.186	100 Orang	Rp 409.980.186	100 Orang	Rp 1.941.476.418	Diskominfo	Kab.Tapin
				Jumlah pegawai yang mendapatkan bimtek/pelatihan di bidang statistik	75 Orang	100 Orang	100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		Diskominfo	Kab.Tapin
		Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	N/A	-	12 Laporan	Rp 225.973.100	13 Laporan	Rp 248.570.410	14 Laporan	Rp 273.427.451	15 Laporan	Rp 273.427.451	16 Laporan	Rp 273.427.451	16 Laporan	Rp 1.294.825.863	Diskominfo	Kab.Tapin
				Jumlah laporan penyelenggaraan Statistik Sektoral	N/A	-	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		Diskominfo	Kab.Tapin
			PROGRAM																	
		Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	**02.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkatnya Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**	**N/A**	**66%**	**68%**	**Rp 364.799.700**	**70%**	**Rp 401.279.670**	**72%**	**Rp 441.407.637**	**74%**	**Rp 441.407.637**	**76%**	**Rp 441.407.637**	**76%**	**Rp 2.090.302.281**	**Diskominfo**	**Kab.Tapin**
		Meningkatnya Kompetensi SDM Keamanan Informasi		**Persentase SDM yang memiliki sertifikat keamanan informasi**	**N/A**	**47%**	**60%**		**73%**		**87%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Diskominfo**	**Kab.Tapin**
		Meningkatnya Pelaksanaan Computer Security Incident Response Team (CSIRT)		**Jumlah Kegiatan Computer Security Icident Response Team (CSIRT)**	**N/A**	**92%**	**94%**		**96%**		**98%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Diskominfo**	**Kab.Tapin**
		Meningkatnya Pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) Perangkat Daerah		**Persentase titik Pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi PHKS yang teramankan**	**33%**	**20%**	**40%**		**60%**		**80%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Diskominfo**	**Kab.Tapin**
			KEGIATAN																	
		Meningkatnya Tata Kelola Pengamanan Informasi		**Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Tata Kelola Pengamanan Informasi pada website SANAPATI**	**100%**	**92%**	**94%**		**96%**		**98%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Diskominfo**	**Kab.Tapin**

Tujuan	Sasaran Strategis	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Sasaran Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*), Kegiatan (*output*), dan Sub Kegiatan	Baseline Tahun 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*4*	*8*	*9*	*10*	*11*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
		Optimalnya Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada perangkat daerah	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik Sesuai Permohonan	N/A	92%	94%	Rp 364.799.700	96%	Rp 401.279.670	98%	Rp 441.407.637	100%	Rp 441.407.637	100%	Rp 441.407.637	100%	Rp 2.090.302.281	Diskominfo	Kab.Tapin
		Terlaksananya bimtek sistem keamanan informasi		Persentase peserta yang mendapatkan nilai diatas passing grade	56%	88%	91%		94%		97%		100%		100%		100%		Diskominfo	Kab.Tapin
		Meningkatnya Pengelolaan aset informasi		Persentase perangkat daerah yang melakukan Pengelolaan aset informasi sesuai dengan peraturan	50%	43%	57%		71%		86%		100%		100%		100%		Diskominfo	Kab.Tapin
			SUB KEGIATAN																	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan	12 Laporan	7 laporan	8 Laporan	Rp 163.045.200	9 Laporan	Rp 179.349.720	10 Laporan	Rp 197.284.692	11 Laporan	Rp 197.284.692	12 Laporan	Rp 197.284.692	12 Laporan	Rp 934.248.996	Diskominfo	Kab.Tapin
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah	12 Laporan	7 laporan	8 Laporan		9 Laporan		10 Laporan		11 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		Diskominfo	Kab.Tapin
		Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan	N/A	-	12 Laporan	Rp 95.641.500	13 Laporan	Rp 105.205.650	14 Laporan	Rp 115.726.215	15 Laporan	Rp 115.726.215	16 Laporan	Rp 115.726.215	16 Laporan	Rp 548.025.795	Diskominfo	Kab.Tapin
				Jumlah Laporan Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Kominfo	N/A	-	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		Diskominfo	Kab.Tapin
		Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	54 Perangkat Daerah	54 Perangkat Daerah	54 Perangkat Daerah	Rp 106.113.000	54 Perangkat Daerah	Rp 116.724.300	54 Perangkat Daerah	Rp 128.396.730	54 Perangkat Daerah	Rp 128.396.730	54 Perangkat Daerah	Rp 128.396.730	54 Perangkat Daerah	Rp 608.027.490	Diskominfo	Kab.Tapin
				Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Tanda Tangan Elektronik	54 Perangkat Daerah	54 Perangkat Daerah	54 Perangkat Daerah		54 Perangkat Daerah		54 Perangkat Daerah		54 Perangkat Daerah		54 Perangkat Daerah		54 Perangkat Daerah		Diskominfo	Kab.Tapin

LHE AKIP Tahun 2025

INSPEKTORAT
KABUPATEN TAPIN

LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP

PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN

Nomor : 700.1.2.1/100/Evaluasi/SAKIP DISKOMINFO/WIL I/IX/INSP/2025
Tanggal 15 September 2025

Disusun Oleh :
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT
Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Nomor 22 Telpon (0517) 31601
R A N T A U Kode Pos 71111

Nomor : 700.1.2.1/100/EVALUASI/SAKIPDISKOMINFO/WIL.I/IX/INSP/2025
Lampiran : Kertas Kerja Evaluasi
H a l : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2024

Rantau, 15 September 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
Di-
Rantau.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kami telah melakukan Evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin. Pelaksanaan Evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah, dan secara khusus bertujuan untuk:

a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;

e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. HASIL EVALUASI

Hasil Evaluasi menunjukkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dengan hasil **Memuaskan (A)** dengan nilai **80,50.**

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan pada hasil, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dengan rincian penilaian sebagai berikut:

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023	Nilai 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,60	24,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	26,10	23,10
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,85	12,30
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,50	20,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		**100**	**79,05**	**80,50**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**BB**	**A**

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, masih terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja:
   1) Indikator Pengukuran dan Evaluasi pada sasaran meningkatnya capaian SAKIP perangkat daerah yang terdapat di cascading dan perjanjian kinerja Sekretaris belum sepenuhnya diturunkan ke level di bawahnya untuk menunjang capaian kinerja;

2) Rencana aksi yang dibuat belum sepenuhnya menggambarkan upaya untuk mencapai kinerja yang diperjanjikan;

2. Pengukuran Kinerja:
   1) Data kinerja yang dikumpulkan pada saat monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya dapat mendukung pengukuran capaian kinerja;
   2) Monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan mempengaruhi penyesuaian Strategi, penyesuaian kebijakan dan penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja yang ditetapkan.

3. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dan jajarannya untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
   1) Menurunkan Indikator Pengukuran dan Evaluasi pada sasaran meningkatnya capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada Sekretaris ke level di bawahnya;
   2) Membuat rencana aksi yang menggambarkan upaya untuk mencapai kinerja yang diperjanjikan.
2. Pengukuran Kinerja
   1) Membuat data capaian kinerja dari setiap level organisasi yang dikumpulkan pada saat monitoring dan evaluasi berkala yang ditargetkan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja:

2) Meningkatkan kualitas pengukuran dan memanfaatkan hasil monitoring capaian kinerja untuk dijadikan penentuan strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja.

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) disampaikan, dengan beberapa simpulan tersebut di atas untuk ditindaklanjuti.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Kabupaten,

Unda Absori, SH., MH
NIP.19700722 200501 1 013

Catatan:
Data KKE terlampir.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker	
			Jawaban	Nilai
1	**PERENCANAAN KINERJA**	**30,00**		**24,6**
1.a	**Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia**	**6,00**	A	**5,4**
Kriteria:				
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.			
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.			
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.			
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.			
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.			
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.			
1.b	**Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)**	**9,00**	BB	**7,2**
Kriteria:				
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.			
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.			
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.			
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.			
5	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).			
6	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.			
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.			
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).			
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).			
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.			
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.			
1.c	**Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan**	**15,00**	BB	**12**
Kriteria:				
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.			
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.			

3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*.			
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.			
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.			
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.			
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.			
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.			
2	**PENGUKURAN KINERJA**	**30,00**		**23,1**
2.a	**Pengukuran Kinerja telah dilakukan**	**6,00**	A	**5,4**
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.			
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator			
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.			
2.b	**Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan**	**9,00**	BB	**7,2**
1	Pimpinan selalu teribat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.			
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.			
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.			
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.			
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.			
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).			
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).			
2.c	**Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien**	**15,00**	B	**10,5**
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.			
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.			
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.			
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.			

5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.			
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.			
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.			
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.			
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.			
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.			
3	**PELAPORAN KINERJA**	**15,00**		**12,3**
3.a	**Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja**	**3,00**	A	**2,7**
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.			
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.			
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.			
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.			
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.			
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.			
3.b	**Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya**	**4,50**	BB	**3,6**
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.			
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.			
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.			
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.			
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.			
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).			
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.			
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.			
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).			
3.c	**Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya**	**7,50**	BB	**6**

1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).			
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.			
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.			
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.			
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.			
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.			
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.			
4	**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**	**25,00**		**20,5**
4.a	**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan**	**5,00**	A	**4,5**
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.			
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh bagian/bidang/seksi/subbagian			
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.			
4.b	**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai**	**7,50**	BB	**6**
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.			
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.			
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.			
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.			
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).			
4.c	**Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja**	**12,50**	BB	**10**
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.			
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal.			

3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.			
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.			
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal.			
			A	80,5